



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEMESTER I TAHUN 2024



INFINITY
BPPP BANYUWANGI

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KP
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP)
BANYUWANGI
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Udayana ini dapat diselesaikan dengan baik.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini merupakan salah satu bentuk komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi dalam upaya mewujudkan sebagai unit pelayanan teknis yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang diharapkan akan membawa dampak positif berupa meningkatnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap terhadap BPPP Banyuwangi.

Kami berharap laporan Monev ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan Keterbukaan Informasi Publik di BPPP Banyuwangi.

Banyuwangi, 25 Juni 2024

PPID BPPP Banyuwangi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN.....	1
B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI.....	4
C. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	5
D. PENUTUP.....	11

BAB I PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang mendasari hak setiap warga negara untuk mengakses informasi yang relevan dengan kepentingan publik. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan demokrasi dalam pelayanan publik. Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk memberikan akses yang mudah dan adil kepada masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan lembaga publik.

Keterbukaan informasi publik menjadi faktor kunci yang penting untuk mencapai tujuan badan publik yang bersih (clean government) dan baik (good government). Dengan memastikan ketersediaan data dan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak tanpa hambatan birokrasi yang kompleks, dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki sistem dan mengawasi tata kelola badan publik. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya yang terjangkau, dan dalam cara yang sederhana. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi sangat penting dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi untuk mencapai good governance, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi masyarakat. Kemudahan akses informasi bagi masyarakat dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 yang mengatur standar pelayanan informasi publik.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi sangat penting untuk memastikan bahwa informasi terkait dengan kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan layanan lainnya yang diselenggarakan dapat diakses oleh masyarakat secara transparan. Hal ini memungkinkan masyarakat, terutama nelayan dan pihak-pihak terkait, untuk memperoleh informasi yang relevan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan, pengambilan keputusan yang berbasis bukti, dan partisipasi yang lebih baik dalam kegiatan yang dilakukan oleh BPPP Banyuwangi.

Dengan menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dan mematuhi KIP, BPPP Banyuwangi harus memiliki kebijakan dan regulasi yang memastikan akses terbuka terhadap informasi-informasi yang relevan. Hal ini mencakup memiliki mekanisme permohonan informasi yang mudah diakses, prosedur yang jelas untuk memproses permohonan tersebut, serta kewajiban untuk memberikan informasi yang diminta dengan cepat dan akurat. Dengan demikian, KIP di BPPP Banyuwangi memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan akuntabilitas, dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan sektor perikanan di wilayah tersebut.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi bertekad mewujudkan menjadi badan publik yang bersih (clean government) dan baik (good government) serta terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi Nomor : KEP.91/BPPP.BYW/TU.140/I/2024 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi untuk melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik. Untuk menunjang kinerja dari

Tim PPID juga telah dibuatkan direktori/fitur khusus PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi pada laman/website yang memuat berbagai informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Melalui fitur dimaksud, masyarakat/stake holder juga dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi.

Dalam rangka pertanggung jawaban kinerja keterbukaan informasi publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dimaksud sebagai bentuk penilaian pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan informasi di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi.

BAB II METODOLOGI

2.1. Waktu

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik di BPPP Banyuwangi, dilaksanakan mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2024.

2.2. Tempat

Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) BPPP Banyuwangi dilaksanakan di Ruang PPID Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPPP Banyuwangi, Jl. Raya Situbondo KM.17 Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

2.3. Pengumpulan Data

Monev terhadap PPID dilakukan terhadap beberapa indikator yakni pengembangan website, pengumuman informasi publik, penyediaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik.

BAB III HASIL PELAKSANAAN MONEV

Berdasarkan Monev yang dilakukan terhadap indikator pengembangan website diperoleh bahwa PPID BPPP Banyuwangi telah memiliki direktori khusus yang terhubung dengan website yang mengumumkan informasi publik terkait BPPP Banyuwangi dan dapat menerima permohonan informasi publik online.

Untuk indikator pengumuman informasi publik, berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 21/PPID-KKP/VIII/2023, tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun, maka daftar informasi yang di buka ke publik meliputi :

1. Struktur Organisasi
2. Profil BPPP Banyuwangi
3. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
4. Pelayanan Publik
5. Realisasi Anggaran
6. Rencana Strategis
7. Rencana Kerja
8. Rencana Aksi
9. Indikator Kinerja
10. Perjanjian Kinerja
11. Laporan Kinerja
12. Laporan Tahunan
13. Laporan Keterbukaan Informasi Publik
14. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

15. Daftar Pengaduan Layanan
16. Agenda Kegiatan Pelatihan
17. Daftar Sarana dan Prasarana
18. Daftar Workshop BPPP Banyuwangi
19. Informasi SDM Pelatih dan Tenaga Kepelatihan
20. Informasi SDM Penyuluh dan Tenaga Kepenyuluhan
21. Daftar Asesor Kompetensi
22. Informasi Diklat Kepelautan
23. Daftar Skema LSP 1
24. Daftar Kerjasama
25. Video Publikasi Pelatihan Online
26. Standar Pelayanan Publik
27. SOP BPPP Banyuwangi

Sedangkan Daftar Informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 1/PPID-KKP/III/2024, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen Pihak Ke III)
 - Data Perusahaan;
 - Rencana Anggaran Biaya;
 - Jenis Spesifikasi Pekerjaan
2. Rincian Harga Sendiri (HPS) barang dan jasa.

3. Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan.
4. Data identitas pelapor kejadian tidak baik.
5. Hasil rapat Baperjakat.
6. Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat.
7. Hasil Assesment.
8. Data Usulan Pemindehan dan Pengangkatan PNS (Mutasi).
9. Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai.
10. Arsip Kepegawaian.
11. Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited).
12. Data pegawai yang masih dalam pengadilan^[1] sebagai saksi atau tersangka.
13. Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai.
14. Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit tujuan tertentu.
15. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan.
16. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit.
17. Data hasil inovasi yang sedang dalam proses pengusulan paten.
18. Data Pribadi Purnawidya Pelatihan.
19. Data Pribadi Pelaku Usaha dan atau Pelaku Utama yang disuluh.
20. Surat-surat/Dokumen yang bersifat Rahasia, Sangat Rahasia dan Konfidensial.
21. Daftar user dan Password Server/Aplikasi/Pangkat TIK.

Sementara untuk indikator penyediaan informasi publik, diperoleh bahwa informasi yang dimaksud dalam Penetapan DIP, setelah dievaluasi telah disajikan dan dapat diakses publik melalui

laman Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi yaitu <https://bpppbanyuwangi.com/> pada menu PPID.

Untuk indikator pelayanan informasi publik, sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi Nomor KEP.91/BPPP.BYW/TU.140/I/2024 Tentang Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, PPID BPPP Banyuwangi terbagi menjadi 4 (empat) bidang yaitu (1) Bidang Pelayanan Informasi; (2) Bidang Pengelolaan; (3) Bidang Penyelesaian Sengketa; dan (4) Bidang Teknologi dan Informasi. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan informasi publik di BPPP Banyuwangi, setelah dilakukan monev terhadap empat bidang tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

No.	Bidang	Uraian Tugas	Hasil Monitoring dan Evaluasi
1.	Bidang Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan informasi publik 2. Menyiapkan bahan dan konsep pelayanan informasi publik 3. Mencatat data dan informasi publik yang diterima 4. Memberikan masukan terhadap pelayanan informasi publik kepada pimpinan 5. Melakukan Survey Pelayanan Informasi Publik 6. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik. 	<p>Dari hasil monev untuk Bidang Pelayanan Informasi disimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melakukan pelayanan informasi publik, Bidang pelayanan Informasi BPPP Banyuwangi telah menerapkan berbagai media informasi, dengan sumber utama dari website resmi Balai non KKP yaitu https://bpppbanyuwangi.com/. Website ini pun memiliki tautan khusus melalui menu “PPID” yang terhubung langsung dengan website resmi PPID BPPP Banyuwangi. Selain melalui menu tersebut, masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi publik dapat langsung datang ke Unit Pelayanan Informasi Publik di Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. 2. Dari hasil monev, pada tahun 2023 Semester 1, PPID BPPP Banyuwangi tidak ada menerima permohonan keberatan atau sengketa informasi publik, sehingga seluruh permohonan informasi yang diajukan dapat diselesaikan oleh PPID.

			<p>3. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima pada tahun 2024 Semester 1 secara online maupun langsung belum ada permohonan.</p> <p>4. Berdasarkan data tersebut, sarana sebagai media untuk mengajukan permohonan informasi publik ke BPPP Banyuwangi tahun ini melalui pengisian form permohonan informasi secara langsung maupun online belum diakses oleh masyarakat.</p>
2.	Bidang Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja 2. Menginventarisasi, mengklasifikasikan informasi publik dan dokumentasi 3. Menata, menyimpan, mendokumentasikan data dan informasi publik secara tertib dan teratur 4. Menyiapkan dokumen/arsip yang aman, dan mudah dicari dalam pemberian informasi publik. 	<p>Dari hasil monev disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pengelolaan telah menyediakan informasi publik sesuai dengan daftar informasi publik, dan mempercepat pemberian data/informasi kepada stakeholder yang dilakukan oleh Bidang Pelayanan Informasi.</p>
	Bidang Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pertimbangan hukum kepada Pelaksana PPID (Tim Pelayanan Informasi) atas keberatan yang disampaikan pemohon dan /atau pengguna informasi. 3. Memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada Tim Penanganan Sengketa Publik dalam rangka penyelesaian sengketa informasi. 	<p>Dari hasil monev disimpulkan bahwa selama Semester 1 Tahun 2024 tidak terdapat permohonan pelayanan publik, sehingga Bidang Penyelesaian Sengketa tidak menerima data/informasi terkait dengan pengajuan sengketa informasi publik di BPPP Banyuwangi.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum apabila terjadinya sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi, baik melalui mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi. 5. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa informasi. 	
	Bidang Teknologi dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sistem fasilitas layanan informasi publik. 2. Menerima permohonan informasi publik yang masuk melalui Laman/Mobile PPID. 3. Menyiapkan dan memutakhirkan teknologi sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik. 4. Menyediakan informasi melalui Laman PPID dan Mobile PPID dalam rangka pelayanan informasi publik. 	<p>Dari hasil monev terhadap Bidang Teknologi dan Informasi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Bidang Teknologi dan Informasi telah melakukan updated data/informasi pada laman PPID https://bpppbanyuwangi.com/.</p> <p>Bidang ini juga telah melakukan koordinasi dengan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar dapat terkoneksi dengan laman PPID KKP, dan diharapkan nantinya pemohon informasi dapat terhubung langsung melalui satu laman dalam melakukan permohonan informasi publik.</p>

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Monev yang dilakukan, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di BPPP Banyuwangi telah berjalan dengan baik, namun juga perlu dilakukan inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan layanan informasi kepada publik. Disamping pelaksanaan Monev ditingkat internal, juga telah dilakukan monev yang dilaksanakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). PPID BPPP Banyuwangi melaksanakan komitmen keterbukaan informasi publik pada Tahun 2024, dan setelah dilakukan evaluasi terhadap kuesioner SAQ KIP yang diisi BPPP Banyuwangi. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik BPPP Banyuwangi sebagai Unit Pelaksana Teknis Informatif ini didukung oleh komitmen Pimpinan Balai dan Tim PPID yang senantiasa melakukan pembenahan dan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik di BPPP Banyuwangi.

Dengan hasil ini masih perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut oleh BPPP Banyuwangi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga dalam mempertahankan predikat sebagai Unit Pelaksana Teknis Informatif dalam memberikan layanan informasi dan menunjang Keterbukaan Informasi Publik di BPPP Banyuwangi.

DOKUMENTASI
KOMITMEN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK











Tuesday, 23 April 2024 at 08.35
+8.071718,+114.421038
Jalan Raya Situbondo No. 17
Banyuwangi
East Java 68453





Tuesday, 23 April 2024 at 08.35
-8.071596,+114.421003
Jalan Raya Situbondo No. 17
Banyuwangi
East Java 68453



Tuesday, 23 April 2024 at 08.34
-8.071934,+114.421334
Jalan Raya Situbondo No. 17
Banyuwangi
East Java 68453





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
BANYUWANGI**

JALAN RAYA SITUBONDO KM. 17 TROMOL POS 8 BANYUWANGI 68453

TELEPON : 0333 – 510688 FAXIMILE : 0333 – 510525

LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespri.bpppbanyuwangi@kkp.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI
NOMOR KEP.91/BPPP.BYW/TU.140/II/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi.
2. Bahwa nama yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini dianggap telah memenuhi persyaratan dan cakap untuk ditunjuk sesuai dengan jabatannya.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114)
3. Keputusan Kepala Balai Nomor : KEP.02/BRSDM-BPPP.BYW/TU.140/II/2024 tanggal 04 Januari 2024 tentang Rencana Operasional Kegiatan (ROK) TA. 2024.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk nama - nama yang tercantum dalam kolom 2 pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPPP Banyuwangi TA. 2024.
- Kedua : Nama - nama yang tercantum dalam kolom 2 dengan jabatan pada kolom 3.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari s.d. 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Banyuwangi, 23 Januari 2024
Kepala Balai Pelatihan
dan Penyuluhan Perikanan
Banyuwangi



Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : KEP.91/BPPP.BYW/TU.140/II/2024
Tanggal : 23 Januari 2024

**DAFTAR NAMA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI TA. 2024**

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Moch. Muchlisin., A.Pi. M.P	Penanggung Jawab
2.	Imawan Zuhron Abrori, ST, MT	Ketua
3.	Firman Pra Setia Nugraha, S.St.Pi, M.Tr.Pi	Koordinator
4.	Nani Susilowati, S.St.Pi	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
5.	Pradita Puspasari, A.Md	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
6.	Candra Istiana, S.ST.Pi	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
7.	Ricky Aditya Saputra, S.ST.Pi	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa
8.	Danar Pradana Akbar, A.Md. Ak	Anggota Bidang Teknologi Informasi
9.	Moch. Rifani Noer Sandhi	Anggota Bidang Teknologi Informasi

Kepala Balai Pelatihan
dan Penyuluhan Perikanan
Banyuwangi



Moch. Muchlisin



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN [HYPERLINK "http://www.kkp.go.id"](http://www.kkp.go.id) www.kkp.go.id SUREL
setjen@kkp.go.id

KEPUTUSAN
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : 21/PPID-KKP/VIII/2023
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf f Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata

- Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PPID-KKP/IX/2022 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Kepala Badan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan ini;
 2. Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini;

3. Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Agustus 2023
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN" at the top and "REPUBLIC INDONESIA" at the bottom. In the center of the stamp, it says "SEKRETARIAT JENDERAL". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "ARI PRABOWO" is printed in a bold, black, sans-serif font.

ARI PRABOWO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 21/PPID-KKP/VIII/2023
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	Nama Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	Tugas dan Fungsi	Berupa deskripsi tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Biro Humas dan KLN	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah peraturan perundang-undangan dan kebijakan dinyatakan tidak berlaku
2	Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan	Hasil pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

3	Grafik Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku	PDB Kelautan dan Perikanan tahunan secara grafis	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
4	Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku	PDB yang didasarkan pada harga triwulan berjalan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
5	Grafik Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku Triwulanan	PDB Kelautan dan Perikanan triwulanan secara grafis	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
6	Grafik Kontribusi PDB Perikanan Terhadap PDB Nasional	Porsi PDB kelautan dan perikanan terhadap total PDB secara grafis	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
7	Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku	PDB yang didasarkan pada harga triwulan berjalan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

8	Kontribusi PDB Perikanan Terhadap PDB Nasional	Porsi PDB kelautan dan perikanan terhadap total PDB	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
9	Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	PDB yang didasarkan pada harga tahun 2010	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
10	Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	sd 52	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
11	Grafik PDB Sektor Perikanan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 dan Laju Pertumbuhan	Laju pertumbuhan PDB perikanan berdasarkan harga konstan 2020 secara grafis	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
12	Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan	Data Series Pertumbuhan PDB sektor perikanan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

13	Laju Implisit PDB Triwulanan	Data Series rasio PDB sektor perikanan harga berlaku dan konstan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
14	PDRB ADHB Sektor Perikanan dan Share PDRB ADHB Sektor Perikanan Menurut Provinsi	Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi terhadap PDB perikanan nasional atas dasar harga berlaku	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
15	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Perikanan Menurut Provinsi	PDRB sektor perikanan berdasarkan harga berlaku dirinci menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
16	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Perikanan Menurut Provinsi	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Perikanan Menurut Provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
17	PDRB ADHK Tahun 2010 Sektor Perikanan dan Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Menurut Provinsi	Data series pertumbuhan PDB sektor perikanan atas dasar harga konstan 2010 menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan Menurut Provinsi	Data series PDB sektor perikanan atas dasar harga konstan menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
19	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan Menurut Provinsi	Data series pertumbuhan PDB sektor perikanan atas dasar harga konstan menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
20	Produksi Perikanan	Volume produksi hasil perikanan tangkap dan budidaya	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
21	Nilai Produksi Perikanan	Nilai produksi hasil perikanan tangkap dan budidaya	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
22	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi	Volume produksi hasil perikanan tangkap dirinci menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

23	Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Provinsi	Volume produksi hasil perikanan tangkap laut dirinci menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
24	Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Menurut Provinsi	Volume produksi hasil perikanan tangkap perairan umum dirinci menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
25	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi	Nilai produksi hasil perikanan tangkap dirinci menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
26	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Provinsi	Nilai produksi hasil perikanan tangkap laut dirinci menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
27	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Menurut Provinsi	Nilai produksi hasil perikanan tangkap perairan umum dirinci menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

28	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi	Volume produksi hasil perikanan budidaya dirinci menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
29	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi	Nilai produksi hasil perikanan budidaya dirinci menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
30	Produksi Benih Perikanan Budidaya Menurut Provinsi	Volume produksi benih perikanan budidaya dirinci menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
31	Nilai Produksi Benih Perikanan Budidaya Menurut Provinsi	Nilai produksi benih perikanan budidaya dirinci menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
32	Produksi Ikan Hias Perikanan Budidaya Menurut Provinsi	Volume produksi ikan hias perikanan budidaya dirinci menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

33	Nilai Produksi Ikan Hias Perikanan Budidaya Menurut Provinsi	Nilai produksi ikan hias perikanan budidaya dirinci menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
34	Wilayah Perikanan Indonesia Pengelolaan Republik	Pennghelolaan perikanan berdasarkan wilayah perairan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
35	Estimasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Perikanan Pengelolaan	Stok ikan tersedia untuk ditangkap berdasarkan WPP	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
36	Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Komoditas Utama	Volume produksi hasil perikanan tangkap laut dirinci menurut komoditas utama	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
37	Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Komoditas Utama	sd no 78	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

38	Jumlah Rumah Tangga Perikanan / Perusahaan Perikanan (RTP/PP) Tangkap Menurut Sub Sektor Perikanan Tangkap	Jumlah rumah tangga dan perusahaan perikanan tangkap pada subsektor perikanan tangkap	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
39	Pertumbuhan Jumlah Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan (RTP/PP) Tangkap	Pertumbuhan jumlah rumah tangga dan perusahaan perikanan tangkap pada subsektor perikanan tangkap (Persen)	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
40	RTP-PP Perikanan Tangkap di Laut Menurut Provinsi	Jumlah rumah tangga dan perusahaan perikanan tangkap di laut menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
41	RTP-PP Perikanan Tangkap di Perairan Umum Menurut Provinsi	Jumlah rumah tangga dan perusahaan perikanan tangkap di perairan umum menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
42	Jumlah Nelayan Menurut Sub Sektor Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan menurut subsektor perikanan tangkap	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

43	Pertumbuhan Jumlah Nelayan Menurut Sub Sektor Perikanan Tangkap	Pertumbuhan jumlah nelayan menurut subsektor perikanan tangkap (persen)	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
44	Nelayan Perikanan Tangkap di Laut Menurut Provinsi	Jumlah nelayan perikanan tangkap di laut menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
45	Nelayan Perikanan Tangkap di Perairan Umum Menurut Provinsi	Jumlah nelayan perikanan tangkap di perairan umum menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
46	Jumlah Perahu/Kapal Perikanan Laut Menurut Kategori dan Ukuran Kapal	Jumlah perahu/kapal perikanan laut menurut kategori dan ukuran kapal	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
47	Jumlah Perahu Kapal Perikanan Tangkap di Laut Menurut Provinsi	Jumlah perahu/kapal perikanan tangkap di laut menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

48	Jumlah Unit Penangkapan Ikan Menurut Sub Sektor Perikanan Tangkap	Jumlah unit penangkapan ikan menurut sub sektor perikanan tangkap	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
49	Pertumbuhan Jumlah Unit Penangkapan Ikan Menurut Sub Sektor Perikanan Tangkap	Pertumbuhan jumlah unit penangkapan ikan menurut sub sektor perikanan tangkap (persen)	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
50	Jumlah Unit Penangkapan Ikan di Laut Menurut Provinsi	Jumlah unit penangkapan ikan di laut dirinci menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
51	Jumlah Unit Penangkapan Ikan di Perairan Umum Menurut Provinsi	Jumlah unit penangkapan ikan di perairan umum dirinci menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
52	Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Volume produksi perikanan tangkap laut menurut WPP (ton)	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

53	Jumlah Pelabuhan Perikanan di Indonesia Menurut Kelas	JUumlah pelabuhan perikanan di Indonesia dirinci menurut kelas	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
54	Persentase Surat Ijin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) Ijin Pusat Menurut Kategori Usaha	Persentase surat izin usaha perikanan tangkap (SIUP) izin pusat menurut kategori usaha	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
55	Realisasi Jumlah Kapal Ijin Pusat	Jumlah kapal menurut perizinan pusat	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
56	Jumlah Kapal Ijin Pusat Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Jumlah kapal dengan perizinan pusat yang dirinci menurut WPP	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
57	RTP-PP Tangkap Menurut Besarnya Usaha dan Subsektor Perikanan Tangkap	Jumlah Rumah tangga perikanan /perusahaan perikanan menurut skala usaha pada subsektor perikanan tangkap	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

58	Kapal Penangkap Ikan Menurut Kategori Kapal Penangkap Ikan dan Sub Sektor Perikanan Tangkap	Jumlah kapal perikanan tangkap menurut kategori	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
59	Jumlah Unit Penangkapan Ikan menurut kategori kapal penangkap ikan dan sub sektor perikanan tangkap	Jumlah unit penangkapan ikan menurut kategori kapal penangkap ikan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
60	RTP-PP Tangkap Laut Menurut Besarnya Usaha	Jumlah Rumah tangga perikanan /perusahaan perikanan tangkap laut menurut skala usaha	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
61	Jumlah unit penangkapan ikan di laut menurut jenis alat penangkapan ikan	Jumlah unit penangkapan ikan di laut menurut alat penangkapan ikan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
62	Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan	Volume produksi perikanan tangkap laut menurut alat penangkapan ikan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

63	Produksi Perikanan Tangkap Laut Per Triwulan	Volume produksi perikanan tangkap laut secara triwulanan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
64	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut Per Triwulan	Nilai produksi perikanan tangkap laut secara triwulanan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
65	RTP-PP Tangkap di Perairan Umum Menurut Besarnya Usaha	Jumlah Rumah tangga perikanan /perusahaan perikanan tangkap di perairan umum menurut skala usaha	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
66	Kapal Penangkap Ikan di Perairan Umum menurut besarnya usaha	Jumlah kapal penangkap ikan di perairan umum menurut skala usaha	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
67	Jumlah unit penangkapan ikan di Perairan Umum menurut jenis alat penangkapan ikan	JUmlah unit penangkapan ikan di perairan umum menurut jenis alat penangkapan ikan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

68	Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan	Volume produksi perikanan tangkap perairan umum menurut alat penangkapan ikan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
69	Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Darat Per Triwulan	Volume produksi perikanan tangkap di perairan darat secara triwulanan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
70	Nilai Produksi perikanan tangkap di Perairan Umum per Triwulan	Nilai produksi perikanan tangkap di perairan darat secara triwulanan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
71	Produksi perikanan tangkap di Perairan Darat menurut Jenis Perairan	Volume produksi perikanan tangkap di perairan darat menurut jenis perairan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
72	Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Darat menurut Jenis Perairan	Nilai produksi perikanan tangkap di perairan darat menurut jenis perairan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

73	Produksi Tangkap Komoditas WPP	Perikanan Berdasarkan Utama dan	Produksi perikanan tangkap laut menurut komoditas utama dan WPP	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
74	Produksi Tangkap Komoditas WPP	Perikanan Berdasarkan Utama Dan	sd no 115	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
75	Produksi Tangkap Komoditas WPP	Perikanan Berdasarkan Utama Dan	sd no 115	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
76	Statistik Perikanan Tangkap Laut		Statistik perikanan tangkap laut meliputi produksi, nelayan, kapal, dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
77	Potensi Lahan Budidaya dan Tingkat Pemanfaatan di Indonesia		jumlah potensi lahan budidaya menurut tingkat pemanfaatannya	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

78	Persentase Pemanfaatan Lahan Budidaya di Indonesia	persentase lahan budidaya menurut tingkat pemanfaatannya	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
79	Potensi dan Luas Areal Budidaya Serta Tingkat Pemanfaatan	jumlah potensi dan luas areal budidaya menurut tingkat pemanfaatannya	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
80	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama	volume produksi perikanan budidaya menurut komoditas utama	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
81	Sebaran Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama	komposisi produksi perikanan budidaya menurut komoditas utama	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
82	Rata-rata Produksi Budidaya Komoditas Utama Sebaran Perikanan Menurut Komoditas Utama	Rata-rata Sebaran Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

83	Produksi Perikanan Budidaya Laut Menurut Jenis Ikan	volume produksi perikanan budidaya laut menurut jenis ikan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
84	Produksi Perikanan Budidaya Tambak Menurut Jenis Ikan	volume produksi perikanan budidaya tambak menurut jenis ikan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
85	Produksi Perikanan Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan	volume produksi perikanan budidaya kolam menurut jenis ikan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
86	Produksi Perikanan Budidaya Karamba Menurut Jenis Ikan	volume produksi perikanan budidaya karamba menurut jenis ikan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
87	Produksi Perikanan Budidaya Jaring Apung Tawar Menurut Jenis Ikan	volume produksi perikanan budidaya jaring apung tawar menurut jenis ikan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

88	Produksi Perikanan Budidaya Jaring Tancap Menurut Jenis Ikan	volume produksi perikanan budidaya jaring tancap menurut jenis ikan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
89	Produksi Perikanan Budidaya Mina Padi Menurut Jenis Ikan	volume produksi perikanan budidaya mina padi menurut jenis ikan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
90	Sasaran Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama	sasaran produksi perikanan budidaya menurut komoditas utama	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
91	15 Provinsi Penghasil Produksi Perikanan Budidaya Terbesar	volume produksi perikanan budidaya terbesar pada 15 provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
92	15 Provinsi Penghasil Nilai Produksi Perikanan Budidaya Terbesar	nilai produksi perikanan budidaya terbesar pada 15 provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

93	Jumlah Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan (RTP/PP) Budidaya Menurut Jenis Budidaya	jumlah RTP/PP menurut jenis budidaya	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
94	Sebaran Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan (RTP/PP) Budidaya Menurut Jenis Budidaya	komposisi RTP/PP menurut jenis budidaya	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
95	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Laut	jumlah RTP/PP pada budidaya laut	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
96	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Tambak	jumlah RTP/PP pada budidaya tambak	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
97	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Kolam	jumlah RTP/PP pada budidaya kolam	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

98	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Karamba	jumlah RTP/PP pada budidaya karamba	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
99	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Jaring Apung	jumlah RTP/PP pada budidaya jaring apung	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
100	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Jaring Tancap	jumlah RTP/PP pada budidaya jaring tancap	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
101	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Mina Padi	jumlah RTP/PP pada budidaya mina padi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
102	Luas Lahan Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya	Luas lahan perikanan budidaya menurut jenis budidaya	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

103	Sebaran Luas Lahan Menurut Jenis Budidaya	Komposisi luas lahan perikanan budidaya menurut jenis budidaya	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
104	Luas Lahan Perikanan Budidaya Laut	Luas lahan perikanan budidaya pada budidaya laut	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
105	Luas Lahan Perikanan Budidaya Tambak	Luas lahan perikanan budidaya pada budidaya tambak	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
106	Luas Lahan Perikanan Budidaya Kolam	Luas lahan perikanan budidaya pada budidaya kolam	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
107	Luas Lahan Perikanan Budidaya Karamba	Luas lahan perikanan budidaya pada budidaya karamba	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

108	Luas Lahan Perikanan Budidaya Jaring Apung	Luas lahan perikanan budidaya pada budidaya jaring apung	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
109	Luas Lahan Perikanan Budidaya Jaring Tancap	Luas lahan perikanan budidaya pada budidaya jaring tancap	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
110	Luas Lahan Perikanan Budidaya Mina Padi	Luas lahan perikanan budidaya pada budidaya mina padi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
111	Produksi Benih Perikanan Budidaya Menurut Lahan	volume produksi benih perikanan budidaya menurut lahan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
112	Pertumbuhan Produksi Benih Perikanan Budidaya Menurut Lahan	pertumbuhan produksi benih perikanan budidaya menurut lahan (persen)	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

113	Produksi Benih Ikan Air Payau/Laut Menurut Komoditas	volume produksi benih ikan air payau/laut menurut komoditas	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
114	Produksi Benih Ikan Air Tawar Menurut Komoditas	volume produksi benih ikan air tawar menurut komoditas	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
115	Produksi Benih Perikanan Budidaya	volume produksi benih perikanan budidaya	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
116	Jumlah dan Luas Danau di Indonesia	Jumlah dan luas danau di Indonesia	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
117	Jumlah dan Luas Waduk di Indonesia	Jumlah dan luas waduk di Indonesia	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

118	Jumlah Pembudidaya Ikan Menurut Jenis Budidaya	Jumlah pembudidaya ikan menurut jenis budidaya	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
119	Sebaran Pembudidaya Ikan Menurut Jenis Budidaya	sebaran pembudidaya ikan menurut jenis budidaya (persen)	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
120	Pembudidaya Ikan Lahan Laut	Jumlah pembudidaya ikan pada lahan laut	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
121	Pembudidaya Ikan Lahan Kolam	Jumlah pembudidaya ikan pada lahan kolam	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
122	Pembudidaya Ikan Lahan Karamba	Jumlah pembudidaya ikan pada lahan karamba	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

123	Pembudidaya Ikan Lahan Jaring Apung	Jumlah pembudidaya ikan pada lahan jaring apung	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
124	Pembudidaya Ikan Lahan Budidaya Jaring Tancap	Jumlah pembudidaya ikan pada lahan budidaya jaring tancap	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
125	Pembudidaya Ikan Lahan Budidaya Mina Padi	Jumlah pembudidaya ikan pada lahan budidaya mina padi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
126	Pembudidaya Ikan Lahan Budidaya Tambak	Jumlah pembudidaya ikan pada lahan budidaya tambak	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
127	Produksi Ikan Hias Menurut Komoditas	Volume produksi ikan hias menurut komoditas	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

128	Luas Tambak Garam Rakyat dan Tenaga Kerja Tambak Garam Rakyat Menurut Kabupaten/Kota PUGAR	Luas tambak dan tenaga kerja pada tambak garam rakyat menurut Kab/kota PUGAR	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
129	Produksi Garam Rakyat Menurut Kabupaten/Kota PUGAR	Volume produksi garam rakyat menurut Kab/kota PUGAR	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
130	Indeks Nilai Tukar Petambak Garam	Nilai tukar petambak garam dalam angka indeks	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
131	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) Menurut Kelompok Komoditas	Nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan dalam angka indeks menurut kelompok komoditas	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
132	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) Menurut Provinsi	Nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan dalam angka indeks menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

133	Nilai Tukar Nelayan (NTN) Menurut Kelompok Komoditas	Nilai tukar nelayan dalam angka indeks menurut kelompok komoditas	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
134	Nilai Tukar Nelayan (NTN) Menurut Provinsi	Nilai tukar nelayan dalam angka indeks menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
135	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Menurut Kelompok Komoditas	Nilai tukar pembudidaya ikan dalam angka indeks menurut kelompok komoditas	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
136	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Menurut Provinsi	Nilai tukar pembudidaya ikan dalam angka indeks menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
137	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Berdasarkan Provinsi	Jumlah unit pengolahan ikan menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

138	Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang Bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	Jumlah unit pengolahan ikan menurut sertifikat kelayakan pengolahan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
139	Rata-rata Konsumsi Ikan Per Kapita Nasional (Kg/Kapita)	Angka perkapita konsumsi ikan nasional	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
140	Rata-Rata Harga Ikan di Pasar Grosir	harga ikan secara rata-rata pada pasar grosir	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
141	Rata-Rata Harga Ikan di Pasar Eceran	harga ikan secara rata-rata pada pasar eceran	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
142	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	Nilai tukar pengolah hasil perikanan dalam angka indeks	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

143	Realisasi Nilai Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan	Nilai investasi pada sektor kealutan dan perikanan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
144	Realisasi Nilai Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan Menurut Provinsi	Nilai investasi pada sektor kealutan dan perikanan menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
145	Realisasi Nilai Investasi Menurut Bidang Usaha	Nilai investasi pada sektor kealutan dan perikanan menurut bidang usaha	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
146	Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas Utama	Volume dan nilai ekspor hasil perikanan menurut komoditas utama	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
147	Volume dan Nilai Impor Hasil Perikanan Menurut Komoditas Utama	Volume dan nilai impor hasil perikanan menurut komoditas utama	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

148	Neraca Perdagangan Komoditas Perikanan	Surplus / defisit nilai ekspor terhadap impor hasil perikanan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
149	Neraca Perdagangan Komoditas Perikanan	sd no 191	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
150	Volume Ekspor Hasil Perikanan Menurut Provinsi Asal	volume ekspor hasil perikanan menurut provinsi asal (ton)	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
151	Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Provinsi Asal	nilai ekspor hasil perikanan menurut provinsi asal (000 Rp)	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
152	Volume Impor Hasil Perikanan Menurut Provinsi	volume impor hasil perikanan menurut provinsi asal (ton)	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

153	Nilai Impor Hasil Perikanan Menurut Provinsi	nilai impor hasil perikanan menurut provinsi asal (000 Rp)	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
154	Volume Ekspor Hasil Perikanan Menurut Negara Tujuan	volume ekspor hasil perikanan menurut negara tujuan (ton)	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
155	Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Negara Tujuan	nilai ekspor hasil perikanan menurut negara tujuan (000 Rp)	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
156	Volume Impor Hasil Perikanan Menurut Negara Asal Impor	volume impor hasil perikanan menurut negara asal impor (ton)	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
157	Nilai Impor Hasil Perikanan Menurut Negara Asal Impor	nilai impor hasil perikanan menurut negara asal impor (000 Rp)	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

158	Luas Daratan, Perairan, Panjang Garis Pantai, Jumlah Pulau di Indonesia, Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Kabupaten/Kota Pesisir	Luas daratan, perairan, panjang garis pantai, jumlah pulau di Indonesia, jumlah kab/kota, dan jumlah kab/kota pesisir	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
159	Pulau-pulau Kecil Terluar di Indonesia Menurut Provinsi	Jumlah pulau-pulau terkecil terluar di Indonesia menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
160	Lokasi Rehabilitasi Mangrove	Lokasi rehabilitasi mangrove menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
161	Lokasi Penanaman Vegetasi Pantai	lokasi penanaman vegetasi pantai menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
162	Kawasan Konservasi Daerah	Jumlah kawasan konservasi daerah menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

163	Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang Dikelola KKP	Kawasan konservasi perairan nasional yang dikelola KKP	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
164	Jumlah Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Wilayah Kerja	Jumlah Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan wilayah kerja	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
165	Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Masyarakat hukum adat pesisir dan pulau-pulau kecil	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
166	Sertifikasi Pulau	Jumlah pulau tersertifikasi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
167	Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun	Jumlah kelembagaan unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menurut tahun	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

168	Rekapitulasi Pengawas Perikanan dan Personel Pengawasan	Rekapitulasi jumlah pengawas perikanan dan personel pengawasan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
169	Jumlah Awak Kapal Pengawas	Jumlah awak kapal pengawas perikanan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
170	Jumlah Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah polisi khusus wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
171	Jumlah Masyarakat Kelompok Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah kelompok masyarakat pengawas	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
172	Jumlah Kapal Tindak Pidana Perikanan yang Ditenggelamkan Berdasarkan Bendera Asal	Jumlah kapal tindak pidana perikanan yang ditenggelamkan berdasarkan bendera asal	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

173	Jumlah Kapal Penangkap Ikan yang Ditangkap Berdasarkan Asal	Jumlah kapal penangkap ikan yang ditangkap berdasarkan daerah asal	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
174	Jumlah Kapal Tindak Pidana Perikanan yang Ditenggelamkan Berdasarkan Lokasi Pemusnahan	Jumlah kapal tindak pidana perikanan yang ditenggelamkan berdasarkan lokasi pemusnahan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
175	Sebaran Penyuluh Kelautan dan Perikanan Menurut Provinsi	Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
176	Jumlah Lulusan Satuan Pendidikan KemenKP Menurut Lokasi	Jumlah lulusan satuan pendidikan kemenKP menurut lokasi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
177	Rekapitulasi Serapan Lulusan Satuan Pendidikan KemenKP	Rekapitulasi serapan lulusan satuan pendidikan kemenKP	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

178	Jumlah Fasilitas Kapal Riset Kapal Latih BPSDMP KP	Jumlah fasilitas kapal riset kapal latih BPSDMP KP	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
179	Jumlah Peserta Didik Menurut Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta didik menurut satuan pendidikan kelautan dan perikanan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
180	Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan aparatur dan masyarakat	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
181	Jumlah Widyaiswara dan Instruktur Menurut Satuan Kerja	Jumlah widyaiswara dan instruktur menurut satuan kerja	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
182	Jumlah Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Menurut Provinsi dan Bidang Usaha	Jumlah pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan (P2MKP) menurut provinsi dan bidang usaha	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

183	Jumlah Sertifikasi Kompetensi bagi masyarakat	Jumlah Sertifikasi Kompetensi bagi masyarakat	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
184	Jumlah dan Frekwensi Media Pembawa Hidup yang Dilalulintaskan Melalui Karantina Ikan Menurut Jenis Lalu Lintas	Jumlah frekwensi media pembawa hidup yang dilalulintaskan melalui karantina ikan menurut jenis lalu lintas	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
185	Jumlah dan Frekwensi Media Pembawa Mati yang dilalulintaskan melalui Karantina Ikan Menurut Jenis lalu Lintas	Jumlah frekwensi media pembawa mati yang dilalulintaskan melalui karantina ikan menurut jenis lalu lintas	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
186	Kelembagaan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Menurut Tingkatan/Kelas	Kelembagaan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menurut tingkatan/kelas	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
187	The Institution of Fish Quarantine Unit by Level/Class	Kelembagaan unit karantina ikan menurut tingkatan/kelas	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

188	Frekuensi Kelompok Media Pembawa Hidup yang Tersertifikasi Dilalulintaskan Domestik Keluar	Frekwensi kelompok media pembawa hidup tersertifikasi yang dilalulintaskan domestik keluar	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
189	Frekuensi Kelompok Media Pembawa Hidup yang Tersertifikasi Dilalulintaskan Domestik Masuk	Frekwensi kelompok media pembawa mati tersertifikasi yang dilalulintaskan domestik keluar	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
190	Frekuensi Kelompok Media Pembawa Hidup Tersertifikasi Yang Diekspor	frekwensi kelompok media pembawa hidup tersertifikasi yang diekspor	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
191	Frekuensi Kelompok Media Pembawa Hidup Tersertifikasi Yang Diimpor	frekwensi kelompok media pembawa hidup tersertifikasi yang diimpor	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
192	Frekuensi Kelompok Media Pembawa Mati yang Tersertifikasi Dilalulintaskan Domestik Keluar	frekwensi kelompok media pembawa mati tersertifikasi yang dilalulintaskan domestik keluar	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

193	Frekuensi Kelompok Media Pembawa Mati Tersertifikasi yang Dilalulintaskan Domestik Masuk	frekwensi kelompok media pembawa mati tersertifikasi yang dilalulintaskan domestik masuk	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
194	Frekuensi Kelompok Media Pembawa Mati Tersertifikasi Yang Diekspor	frekwensi kelompok media pembawa mati tersertifikasi yang diekspor	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
195	Frekuensi Kelompok Media Pembawa Mati Tersertifikasi Yang Diimpor	frekwensi kelompok media pembawa mati tersertifikasi yang diimpor	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
196	Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	larangan pemasukan jenis ikan berbahaya dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
197	Jumlah Penolakan Ekspor Komoditas hasil Perikanan Menurut Negara Mitra	jumlah penolakan ekspor komoditas hasil perikanan menurut negara mitra	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

198	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan	jumlah peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
199	Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dana alokasi khusus yang disalurkan oleh KKP menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
200	Alokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	Alokasi anggaran KKP menurut provinsi	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
201	Alokasi dan Realisasi APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan	Alokasi anggaran dan realisasi APBN KKP	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
202	PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan	Jumlah PNBP yang diterima oleh KKP	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

203	Keragaan Pegawai Negeri Sipil KKP Menurut Jenis Kelamin	Keragaan PNS KKP menurut jenis kelamin	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
204	Jumlah Pegawai KKP Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	Jumlah pegawai KKP menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
205	Keragaan Pegawai Negeri Sipil KKP Menurut Unit Eselon I, Jenis Kelamin dan Golongan	Keragaan PNS KKP menurut unit eselon I, jenis kelamin dan golongan	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
206	Keragaan Pegawai Negeri Sipil KKP Menurut Unit Eselon I, Jenis Kelamin dan Usia	Keragaan PNS KKP menurut unit eselon I, jenis kelamin dan kelompok umur	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
207	Sebaran KUSUKA berdasarkan Pelaku Usaha, Provinsi dan Kabupaten Kota	Jumlah Kusuka menurut pelaku usaha, provinsi, dan kab/kota	Pusat Data Statistik, Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Jenderal	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan

208	Informasi tentang profil Ditjen Perikanan Tangkap, tugas dan fungsi serta struktur organisasi	Informasi mengenai profil, tugas dan fungsi dan struktur organisasi Ditjen Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	Tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
209	Daftar Penerima Bantuan Pemerintah	Informasi daftar penerima bantuan pemerintah	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	Tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
210	Profil	Sejarah, Informasi mengenai kedudukan, domisili beserta alamat lengkap kontak, struktur organisasi, profil lengkap pejabat Ditjen Perikanan Budidaya, tugas dan fungsi, serta visi dan misi	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
211	Visi Misi	Berupa data visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	Sampai dengan adanya visi dan misi yang terbaru sesuai peraturan yang berlaku
212	Sasaran Strategis	Dokumen sasaran strategis dari Ditjen Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	Sampai dengan adanya kebijakan terbaru sesuai peraturan yang berlaku

213	Tugas dan Fungsi	Informasi tugas dan fungsi dari Ditjen Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	Sampai dengan adanya kebijakan terbaru sesuai peraturan yang berlaku
214	Struktur Organisasi	Berupa data struktur organisasi Ditjen Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal tahun 2020, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	Sampai dengan adanya kebijakan terbaru sesuai peraturan yang berlaku
215	Informasi Kinerja	Berupa dokumen informasi kinerja Ditjen Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	Sampai dengan adanya kebijakan terbaru sesuai peraturan yang berlaku
216	Laporan Keuangan Tahun 2021	Dokumen laporan keuangan Tahun 2021	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
217	Informasi Peraturan Perundangan	Informasi peraturan perundang-undangan	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	hingga ada informasi peraturan terbaru

218	Informasi Cara Memperoleh Informasi Publik	Berupa tata cara memperoleh informasi publik	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1 tahun, hingga ada Standar Operasional Terbaru
219	Informasi Pengaduan	Berupa informai pengaduan	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	hingga terdapat peraturan perundang-undangan terbaru
220	Informasi Pengumuman Pengadaan	Berupa informasi pengadaan	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
221	Rencana Strategis	Berupa dokumen Rencana Strategis Ditjen Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
222	Indeks Kinerja Utama DJPB	Berupa data Indeks Kinerja Utama Ditjen Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali

223	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Berupa rencana aksi Reformasi Birokrasi	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
224	Kode Etik Pegawai	Berupa panduan Kode Etik Pegawai	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	lima tahun setelah diubah menjadi arsip dan setelah dinilai kembali
225	Juknis Bantuan Pemerintah	Berupa petunjuk teknis Bantuan Pemerintah	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	lima tahun setelah diubah menjadi arsip
226	Daftar Penerima Bantuan Tahun 2021	Berupa daftar Penerima Bantuan Tahun 2021	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	lima tahun setelah diubah menjadi arsip
227	Daftar Pakan Ikan/Udang Terdaftar	Berupa data Daftar Pakan Ikan/Udang Terdaftar	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	satu tahun setelah diubah menjadi arsip

228	Daftar Obat Ikan Terdaftar	Berupa dokumen Daftar Obat Ikan Terdaftar	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	satu tahun setelah diubah menjadi arsip
229	Daftar Unit Budidaya Bersertifikat CBIB	Berupa dokumen Daftar Unit Pembenihan Bersertifikat CPIB	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	satu tahun setelah diubah menjadi arsip
230	Daftar Unit Pembenihan Bersertifikat CPIB	Berupa Daftar Unit Pembenihan Bersertifikat CPIB	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	satu tahun setelah diubah menjadi arsip
231	Rekapitulasi Penerima Layanan Rekomendasi Pemasukan Ikan Hidup Dan Atau Inti Mutiara Tahun 2022	Berupa data Rekapitulasi Penerima Layanan Rekomendasi Pemasukan Ikan Hidup Dan Atau Inti Mutiara Tahun 2022	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	sebelum atau awal 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	satu tahun setelah diubah menjadi arsip
232	Daftar Produsen Lulus Sertifikasi CPPIB	Berupa data daftar Produsen Lulus CPPIB	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Tahun 2016-2022, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	satu tahun setelah diubah menjadi arsip

233	Permohonan Data dan Informasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	Permohonan Data dan Informasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	satu tahun setelah diubah menjadi arsip
234	SOP Perikanan Budidaya	Berupa standar prosedur di lingkungan Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah dinilai kembali
235	Surat Edaran Larangan Penggunaan Induk Asal Tambak	Berupa Surat Edaran Larangan Penggunaan Induk Asal Tambak	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	tahun 2019, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah dinilai kembali
236	Surat Edaran Klarifikasi Undangan Bimbingan Teknis dan Penetapan Kelompok Pembudidaya Penerima Bantuan Program Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019	Berupa Surat Edaran Klarifikasi Undangan Bimbingan Teknis dan Penetapan Kelompok Pembudidaya Penerima Bantuan Program Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	tahun 2019, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah dinilai kembali
237	Surat Edaran Tentang Perubahan Sementara Prosedur Permohonan dan Penerbitan Surat Keterangan Teknis (SKT) Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan	Berupa Surat Edaran Tentang Perubahan Sementara Prosedur Permohonan dan Penerbitan Surat Keterangan Teknis (SKT) Impor Pakan	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	tahun 2020, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah dinilai kembali

		Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan					
238	Surat Edaran Akses Kelancaran Pengiriman Logistik Input Produksi dan Suplai Hasil Produksi Bidang Perikanan Budidaya	Berupa Surat Edaran Akses Kelancaran Pengiriman Logistik Input Produksi dan Suplai Hasil Produksi Bidang Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	tahun 2020, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah dinilai kembali
239	Surat Edaran Klarifikasi Terhadap Surat Program Dana Alokasi Khusus yang Mengatasmakan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Berupa Surat Edaran Klarifikasi Terhadap Surat Program Dana Alokasi Khusus yang Mengatasmakan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	tahun 2020, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah dinilai kembali
240	Klarifikasi terhadap surat Undangan Bimbingan Teknis dan Penetapan Kelompok Perikanan Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Perikanan T.A 2020 yang mengatasmakan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Berupa Klarifikasi terhadap surat Undangan Bimbingan Teknis dan Penetapan Kelompok Perikanan Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Perikanan T.A 2020 yang mengatasmakan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	tahun 2020, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah dinilai kembali
241	Surat Edaran Upaya Pencegahan Masuk dan Tersebaranya Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) Penyebab Penyakit pada Krustase ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Berupa Surat Edaran Upaya Pencegahan Masuk dan Tersebaranya Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) Penyebab Penyakit pada Krustase ke dalam Wilayah Negara	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	tahun 2020, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah dinilai kembali

		Kesatuan Republik Indonesia					
242	Klarifikasi terhadap surat Undangan Rapat Koordinasi Penetapan Calon Penerima dan Penandatanganan Perjanjian Program Bantuan Dana Hibah TA. 2022 yang mengatasmakan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Berupa Klarifikasi terhadap surat Undangan Rapat Koordinasi Penetapan Calon Penerima dan Penandatanganan Perjanjian Program Bantuan Dana Hibah TA. 2022 yang mengatasmakan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	tahun 2022, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah dinilai kembali
243	SURAT EDARAN TENTANG PENCEGAHAN IKAN LEPAS DARI UNIT PEMBUDIDAYAAN IKAN	Berupa Surat Edaran Tentang Pencegahan Ikan Lepas dari Unit Pembudidaya Ikan	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	tahun 2021, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah dinilai kembali
244	SURAT EDARAN NOMOR B.21940/DJPB/VIII/2021 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19 PADA USAHA PERIKANAN BUDIDAYA	Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid 19 Pada Usaha Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	tahun 2021, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah dinilai kembali
245	Kajian Awal Lingkungan (IEE) dan Kerangka Kajian dan Review Lingkungan (EARF) Proyek Peningkatan Infrastruktur Budidaya Udang (IISAP)	Kajian Awal Lingkungan dan Kerangka Kajian dan Review Lingkungan Proyek Peningkatan Infrastruktur Budidaya Udang	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah dinilai kembali

246	Daftar Informasi Publik	Berupa Daftar Informasi Publik di Lingkungan DJPB	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah diubah menjadi arsip
247	Daftar Peraturan Rancangan	Berupa Daftar Rancangan Peraturan	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah menjadi peraturan
248	Informasi Administrasi Organisasi, dan Kepegawaian	Berupa Informasi Organisasi, Administrasi dan Kepegawaian	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	tahun 2020, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
249	Informasi tentang profil UPT	Informasi profil dari UPT Ditjen PB	BBPBAT Sukabumi	Kepala BBPBAT Sukabumi	Tahun 2023, Sukabumi	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
250	Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan : - juknis budidaya - hasil rekayasa - leaflet - brosur - buku - dst	Informasi tentang program yang sedang dijalankan	BBPBAT Sukabumi	Kepala BBPBAT Sukabumi	Tahun 2022, Sukabumi	<i>Soft Copy</i>	5 Tahun setelah dinilai kembali

251	Ringkasan informasi kinerja UPT - LKJ - PK - dst	Informasi tentang SKAIP	BBPBAT Sukabumi	Kepala BBPBAT Sukabumi	tahun 2023, Sukabumi	<i>Soft Copy</i>	1 tahun + 4 tahun setelah dinilai kembali
252	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik	Berupa Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik	BBPBAT Sukabumi	Kepala BBPBAT Sukabumi	tahun 2017, Sukabumi	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah diubah menjadi arsip
253	Informasi tentang tata cara pengaduan	Berupa Informasi tentang tata cara pengaduan	BBPBAT Sukabumi	Kepala BBPBAT Sukabumi	tahun 2023, Sukabumi	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah diubah menjadi arsip
254	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	Berupa Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	BBPBAT Sukabumi	Kepala BBPBAT Sukabumi	tahun 2023, Sukabumi	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah diubah menjadi arsip
255	Daftar informasi publik	Berupa Daftar Informasi Publik di BBPBAT Sukabumi	BBPBAT Sukabumi	Kepala BBPBAT Sukabumi	tahun 2023, Sukabumi	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali

256	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan	Berupa informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan	BBPBAT Sukabumi	Kepala BBPBAT Sukabumi	tahun 2023, Sukabumi	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
257	Informasi Terkait profil KKP, Profil BBPBL Lampung, kedudukan domisili instansi dan kontak Balai serta alamat surat elektronik	Informasi Profil BBPBL Lampung, bersama detail instansi, titik kedudukan dan kontak beserta alamat surat elektronik	BBPBL Lampung	Kepala BBPBL Lampung	Tahun 2023, Ja	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
258	Struktur organisasi BBPBL Lampung	Berupa data struktur organisasi BBPBL Lampung	BBPBL Lampung	Kepala BBPBL Lampung	Tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
259	Tugas Pokok dan Fungsi, visi dan misi BBPBL Lampung	Berupa data tugas dan fungsi, visi misi dari BBPBL Lampung	BBPBL Lampung	Kepala BBPBL Lampung	Tahun 2023, Lampung	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
260	Informasi layanan publik yang dilaksanakan di BBPBL Lampung, yaitu : a) Pelayanan jasa : pengujian laboratorium dan pelayanan kunjungan, PKL, magang, penelitian, study banding, dan bimtek;	Berupa "Informasi layanan publik yang dilaksanakan di BBPBL Lampung, yaitu : a) Pelayanan jasa : pengujian laboratorium dan pelayanan kunjungan, PKL, magang,	BBPBL Lampung	Kepala BBPBL Lampung	tahun 2023, Lampung	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali

		penelitian, study banding, dan bimtek; "					
261	Pelayanan produk : telur, benih, calon induk, induk, ikan konsumsi (Kerapu Macan, Kerapu Bebek, Kakap Putih, Kakap Merah, Bawal Bintang, Kobia, Teripang, Ikan Hias, Kuda Laut), pakan alami, rumput laut.	Berupa informasi Pelayanan produk : telur, benih, calon induk, induk, ikan konsumsi (Kerapu Macan, Kerapu Bebek, Kakap Putih, Kakap Merah, Bawal Bintang, Kobia, Teripang, Ikan Hias, Kuda Laut), pakan alami, rumput laut.	BBPBL Lampung	Kepala BBPBL Lampung	tahun 2023, Lampung	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
262	Sarana dan prasarana layanan	Informasi Sarana dan prasarana layanan	BBPBL Lampung	Kepala BBPBL Lampung		<i>Soft Copy</i>	
263	SDM yang menangani layanan informasi publik	Berupa surat tugas PPID	BBPBL Lampung	Kepala BBPBL Lampung	tahun 2022, Lampung	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
264	Informasi terkait adanya kejadian serangan pengakit di suatu wilayah atau kejadian blooming plankton di suatu perairan yang mengakibatkan kematian massal	Berupa informasi tentang cuaca dan penyakit ikan BBPBL Lampung	BBPBL Lampung	Kepala BBPBL Lampung	tahun 2021, Lampung	<i>Soft Copy</i>	5 Tahun nilai kembali

265	Informasi sebaran jenis HPI dan dampak yang ditimbulkan	monitoring kesehatan ikan dan lingkungan di Karamba Jaring Apung (KJA)	BBPBL Lampung	Kepala BBPBL Lampung	tahun 2023, Lampung	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
266	Informasi terkait kegiatan program prioritas	Kegiatan distribusi bantuan benih ikan Kakap Putih	BBPBL Lampung	Kepala BBPBL Lampung	tahun 2023, Lampung	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
267	LKJ per triwulan	Laporan Kinerja Tri Wulan IV BBPBL Lampung Tahun 2022	BBPBL Lampung	Kepala BBPBL Lampung	tahun 2022, Lampung	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
268	Informasi terkait realisasi serapan anggaran	Laporan realisasi anggaran bulan Januari 2023	BBPBL Lampung	Kepala BBPBL Lampung	tahun 2023, Lampung	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
269	Buletin	Buletin Budidaya Laut no. 48 BBPBL Lampung	BBPBL Lampung	Kepala BBPBL Lampung	tahun 2020, Lampung	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

270	Laporan Tahunan	Laporan Tahunan BBPBL Lampung Tahun 2022	BBPBL Lampung	Kepala BBPBL Lampung	tahun 2022, Lampung	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
271	SIRUP	SIRUP BBPBL LAMPUNG PER MARET 2023	BBPBL Lampung	Kepala BBPBL Lampung	tahun 2023, Lampung	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
272	Juknis	Lebih lengkap tentang juknis Pembeniha Ikan Kerapu	BBPBL Lampung	Kepala BBPBL Lampung	tahun 2022, Lampung	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
273	Surat Tugas PPID 2022	Berupa surat tugas PPID	BBPBL Lampung	Kepala BBPBL Lampung	tahun 2022, Lampung	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
274	Profil Sejarah BPBL Ambon	Berupa data profil BPBL Ambon	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali

275	Profil Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi	Visi Misi dan Tujuan Organisasi BPBL Lampung	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
276	Profil Struktur Organisasi BPBL Ambon	Profil Struktur Organisasi BPBL Ambon	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
277	Profil SDM BPBL Ambon	Berupa SDM BPBL Ambon	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
278	Profil Fasilitas BPBL Ambon	Fasilitas yang disediakan di BPBL Ambon	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
279	Maklumat Pelayanan	Berupa dokumen maklumat pelayanan BPBL Ambon	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali

280	IKM	Berupa data IKM BPBL Ambon	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
281	Standar Laboratorium pelayanan	Standar Pelayanan Laboratorium BPBL Ambon	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	
282	Komoditas Unggulan BPBL Ambon	Daftar komoditas unggulan dari BPBL Ambon	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	
283	Company Profile	Berupa data profile	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah <i>compny profile</i> diperbaharui dan dinilai kembali
284	Leaflet Budidaya	Berupa Leaflet Budidaya BPBL Ambon	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah dilakukan perubahan

285	Perjanjian Kinerja	Berupa informasi Perjanjian Kinerja	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah diubah menjadi arsip
286	Manajemen Resiko	Berupa dokumen Manajemen Resiko	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah diubah menjadi arsip
287	Renstra BPBL Ambon	Berupa dokumen Renstra BPBL Ambon	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah diubah menjadi arsip
288	Peraturan lingkup BPBL Ambon	Berupa Informasi Peraturan lingkup BPBL Ambon	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah diubah menjadi arsip
289	Laporan Capaian Kinerja	Berupa Laporan Capaian Kinerja	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah diubah menjadi arsip

290	Laporan Kinerja	Berupa Laporan Kinerja	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah diubah menjadi arsip
291	Laporan Tahunan/LKJ Triwulan IV	Berupa laporan Laporan Tahunan/LKJ Triwulan IV	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah diubah menjadi arsip
292	Laporan Tahunan/LKJ Triwulan IV 2022	Berupa Laporan Tahunan/LKJ Triwulan IV 2022	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah diubah menjadi arsip
293	Informasi Tahapan Kultur Rumput Laut Kultur Jaringan	Berupa Informasi Tahapan Kultur Rumput Laut Kultur Jaringan	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah diubah menjadi arsip
294	Informasi Peta Sebaran Bantuan Rumput Laut BPBL Ambon	Berupa Informasi Peta Sebaran Bantuan Rumput Laut BPBL Ambon	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah diubah menjadi arsip

295	Informasi safety briefing BPBL Ambon 2023	Berupa Informasi safety briefing BPBL Ambon 2023	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah diubah menjadi arsip
296	Informasi Budidaya Lobster	Informasi Data Budidaya Lobster	BPBL Ambon	Kepala BPBL Ambon	Tahun 2023, Ambon	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah diubah menjadi arsip
297	Informasi tentang Profil Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem	Informasi tentang Profil Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem "	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU2K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah dilakukan perubahan
298	Tugas Pokok dan Fungsi	Informasi tentang tugas dan fungsi dari BPIU2K Karangasem	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU3K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah dilakukan perubahan
299	Sejarah	Informasi tentang sejarah BPIU2K Karangasem	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU4K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah dilakukan perubahan

300	Struktur Organisasi	Informasi tentang struktur BPIU2K Karangasem	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU5K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah dilakukan perubahan
301	Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup kementerian -Visi, Misi dan Tujuan - Sasaran Startegis - Struktur Organisasi	Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup kementerian -Visi, Misi dan Tujuan - Sasaran Startegis - Struktur Organisasi	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU6K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
302	Berita Terkini	Berupa Berita Terkini	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU7K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun setelah menjadi arsip
303	Foto Dokumentasi Kegiatan	Berupa foto Dokumentasi Kegiatan	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU8K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun setelah menjadi arsip
304	Video Dokumentasi Kegiatan	Berupa Video Dokumentasi Kegiatan	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU9K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun setelah menjadi arsip

305	Info grafis	Berupa Infografis BPIU2K Karangasem	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU10K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun setelah menjadi arsip
306	Media Sosial Facebook	Berupa data sosial media facebook	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU11K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun setelah menjadi arsip
307	Media Sosial Instagram	Berupa Media Sosial Instagram	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU12K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun setelah menjadi arsip
308	Media Sosial Twitter	Berupa Media Sosial Twitter	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU13K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun setelah menjadi arsip
309	Media Sosial Youtube	Berupa Media Sosial Youtube	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU14K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun setelah menjadi arsip

310	Media Sosial Tiktok	Berupa Media Sosial Tiktok	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU15K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun setelah menjadi arsip
311	Leaflet	Berupa Leaflet BPIU2K Karangasem	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU16K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun setelah menjadi arsip
312	Jurnal Perencanaan	Data kalkulasi Jurnal Perencanaan	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU17K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun setelah menjadi arsip
313	Jurnal Pengawas	Berupa data Jumlah Pengawas	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU18K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun setelah menjadi arsip
314	Ringkasan informasi kinerja : - LKJ - PK - dst	Berupa data Ringkasan informasi kinerja : - LKJ - PK - dst"	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU19K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali

315	Renstra		Ringkasan Renstra	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU20K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
316	Perjanjian Rencana Kerja, Kinerja, Laporan Kinerja 2017		Berupa data Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, Laporan Kinerja 2017	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU21K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
317	Perjanjian Rencana Kerja, Kinerja, Laporan Kinerja 2018		Informasi Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, Laporan Kinerja 2018	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU22K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
318	Perjanjian Rencana Kerja, Kinerja, Laporan Kinerja 2019		Informasi Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, Laporan Kinerja 2019	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU23K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
319	Perjanjian Rencana Kerja, Kinerja, Laporan Kinerja 2020		Informasi Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, Laporan Kinerja 2019	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU24K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

320	Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, Laporan Kinerja 2021	Informasi Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, Laporan Kinerja 2021	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU25K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
321	Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, Laporan Kinerja 2022	Informasi Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, Laporan Kinerja 2022	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU26K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
322	Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, Laporan Kinerja 2023	Informasi Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, Laporan Kinerja 2023	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU27K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
323	Laporan tahunan	Informasi Laporan Tahunan BPIU2K Karangasem	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU28K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
324	Informasi tentang peraturan perundang-undangan	Informasi tentang peraturan perundang-undangan	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU29K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

325	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU30K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
326	Informasi tentang tata cara pengaduan	Informasi tentang tata cara pengaduan	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU31K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
327	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU32K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
328	Pengumuman	Berupa pengumuman oleh BPIU2K Karangasem	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU33K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
329	Lab Uji mendapatkan terakreditasi KAN ISO 17025:2017	Sertifikasi Lab Uji mendapatkan terakreditasi KAN ISO 17025:2017	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU34K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

330	BPIU2K Karangasem Mendapat Penghargaan Sebagai Infografis Teraktif	Penghargaan kepada BPIU2K Karangasem sebagai Unit Kerja yang memiliki infografis interaktif	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU35K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
331	Daftar informasi publik	Berupa Daftar informasi publik BPIU2K Karangasem	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU36K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
332	Maklumat Layanan	Berupa Maklumat Layanan BPIU2K Karangasem	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU37K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
333	Jenis Layanan	Berupa Jenis Layanan di BPIU2K Karangasem	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU38K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
334	Layanan Magang, PKL dan Penelitian	Berupa informasi Layanan Magang, PKL dan Penelitian	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU39K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

335	Layanan Uji Laboratorium	Informasi Layanan Uji Laboratorium	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU40K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	
336	Layanan Pemerintah Bantuan	Berupa Layanan Bantuan Pemerintah	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU41K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	
337	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan	Berupa Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU42K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
338	Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan	Berupa dokumen daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU43K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah menjadi peraturan
339	BPIU2K Gateway	Berupa BPIU2K Gateway	BPIU2K Karangasem	Kepala BPIU44K Karangasem	tahun 2023, Karangasem	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

340	Profil	Berupa informasi Profil BPIU2K Gateway	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun setelah dinilai kembali
341	Sejarah	Berupa Sejarah BLUPPB Karawang	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun setelah dinilai kembali
342	Visi dan Misi Organisasi	Berupa Visi dan Misi Organisasi	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun setelah dinilai kembali
343	Struktur Organisasi	Berupa Struktur Organisasi	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun setelah dinilai kembali
344	Tugas Pokok dan Fungsi	Berupa Tugas Pokok dan Fungsi	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun dinilai kembali

345	Strategi dan Kebijakan	Strategi dan Kebijakan	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun dinilai kembali
346	Tata Usaha, Fasilitas Perkantoran	Berupa informasi fasilitas Perkantoran	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun dinilai kembali
347	Teknik Usaha Produksi, Komoditas Unggulan	Berupa informasi komoditas unggulan dan tehnik usaha produksi	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
348	Pelayanan Teknik	Informasi pelayanan teknik	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
349	Sarana Teknik, Fasilitas Budidaya	Berupa informasi sarana teknik, fasilitas budidaya	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

350	Hasil Perekayasaan	Berupa informasi hasil perekayasaan	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
351	Leaflet	Leaflet BLUPPB Karawang	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
352	Juknis Budidaya	Berupa petunjuk teknis Budidaya	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
353	Perjanjian Kinerja	Informasi Perjanjian Kinerja	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
354	Renstra Karawang BLUPPB	Berupa informasi rencana strategis Renstra BLUPPB Karawang	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

355	Laporan Kinerja	Berupa informasi laporan kinerja	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
356	Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum	Berupa Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
357	Pengadaan Barang/Jasa	Informasi Pengadaan Barang/Jasa	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
358	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
359	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Informasi Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

360	Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, Laporan Kinerja 2021	Informasi Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, Laporan Kinerja 2021	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
361	Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021	Informasi Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2021	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2021, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
362	Laporan tahunan	Berupa laporan Laporan tahunan	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2019, Karawang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
363	Informasi tentang peraturan perundang-undangan	Informasi Informasi tentang peraturan perundang-undangan	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
364	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah dinilai kembali

365	Informasi tentang tata cara pengaduan	Berupa tata cara pengaduan	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah dinilai kembali
366	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	Berupa pengumuman pengadaan barang dan jasa	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah dinilai kembali
367	Pengumuman	Berupa pengumuman BLUPPB Karawang	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
368	Lab Uji mendapatkan terakreditasi KAN ISO 17025:2008	Berupa informasi Lab Uji mendapatkan terakreditasi KAN ISO 17025:2008	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
369	Standar Pelayanan Publik	Berupa informasi Standar Layanan Publik	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

370	Maklumat Layanan	Berupa informasi Maklumat Layanan	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
371	Kampanye Whistle Blowing System Dilingkungan BLUPPB Karawang	Berupa aplikasi pengaduan tindak pelanggaran	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
372	Jenis Layanan	Berupa informasi Pelayanan Teknik BLUPPB Karawang	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	
373	Layanan Magang, PKL dan Penelitian	Berupa informasi Magang, PKL dan Penelitian	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah menjadi arsip
374	Layanan Uji Laboratorium	Informasi Layanan Uji Laboratorium	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah menjadi arsip

375	facebook	Berupa informasi facebook BLUPPB Karawang	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	Selama facebook BLUPPB Karawang diupdate
376	Twitter	Berupa informasi Twitter BLUPPB Karawang	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	Selama twitter BLUPPB Karawang diupdate
377	Instagram	Berupa informasi Instagram BLUPPB Karawang	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	Selama Instagram BLUPPB Karawang diupdate
378	Youtube	Berupa informasi Youtube BLUPPB Karawang	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang		<i>Soft Copy</i>	Selama Youtube BLUPPB Karawang diupdate
379	Tik Tok	Berupa informasi Instagram BLUPPB Karawang	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang		<i>Soft Copy</i>	Selama Tiktok BLUPPB Karawang diupdate

380	Layanan Pemerintah Bantuan	Berupa informasi layanan Bantuan Pemerintah	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
381	Bantuan Benih Ikan	Berupa informasi bantuan benih Ikan	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun menjadi arsip
382	Bantuan Pakan Mandiri	Berupa informasi Bantuan Pakan Mandiri	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
383	Bantuan Bioflok	Berupa informasi Bioflok	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	setelah 10 tahun menjadi arsip
384	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan	Berupa Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

385	Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan	Berupa Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan	BLUPPB Karawang	Kepala BLUPPB Karawang	tahun 2023, Karawang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
386	Sekilas tentang BPBAP Situbondo	Informasi Sekilas tentang BPBAP Situbondo	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2020, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
387	Visi dan Misi	Berisi informasi Visi, Misi dan Tujuan KKP	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2020, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
388	Tugas dan Fungsi	Berisi informasi Tugas dan Fungsi dari BPBAP Situbondo	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2020, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
389	Sejarah	Berupa sejarah BPBAP Situbondo	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2020, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun setelah dinilai kembali

390	Wilayah Kerja	Berupa informasi Wilayah Kerja BPBAP Situbondo	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
391	Fasilitas	Berupa fasilitas BPBAP Situbondo	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
392	Inovasi	Berupa informasi Inovasi BPBAP Situbondo	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
393	Maklumat Pelayanan	Berupa Maklumat Pelayanan BPBAP Situbondo	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	1 tahun dinilai kembali
394	SK Maklumat Pelayanan	Berisi informasi SK Maklumat Pelayanan BPBAP Situbondo	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2022, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	Setelah diterbitkan SK terbaru

395	Jenis Pelayanan	Berupa informasi Jenis Pelayanan	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
396	Standar Pelayanan Publik	Berisi informasi Standar Pelayanan Publik BPBAP Situbondo	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2022, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
397	Visi dan Misi Pelayanan	Berisi informasi Visi dan Misi Pelayanan BPBAP Situbondo	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
398	Tarif Pelayanan	Berisi informasi Tarif Pelayanan di BPBAP Situbondo	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2021, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
399	Alur Pelayanan Publik	Berupa informasi Alur Pelayanan Publik	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	1 tahun dinilai kembali

400	Prosedur Masyarakat Pengaduan	Berupa layanan informasi pengaduan publik	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	1 tahun dinilai kembali
401	Pelaporan Gratifikasi	Berupa tatacara pengaduan	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	1 tahun dinilai kembali
402	Informasi kegiatan BPBAP Situbondo di Twitter	Informasi kegiatan BPBAP Situbondo	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
403	Website PPID KKP	Berupa informasi layanan Bantuan Pemerintah	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
404	Profil PPID DJPB	Berupa informasi layanan BPPAP Situbondo Gateway	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali

405	Regulasi	Berupa informasi regulasi PPID	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
406	Informasi Penerimaan Pegawai	Informasi penerimaan pegawai	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
407	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Berupa informasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	1 tahun dinilai kembali
408	Manual IKU	Berupa informasi Manual IKU BPBAP	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	
409	Hasil Penilaian AKIP	Berupa informasi Hasil Penilaian AKIP 2022	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2022, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

410	RKA-K/L	Berupa data RKA-K/L	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2022, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
411	Rencana Aksi	Berupa rencana aksi BPBAP Situbondo	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2022, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
412	Informasi Serta Merta	Berupa Informasi Serta Merta	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
413	Informasi yang dikeluahkan	Berupa informasi yang dikeluahkan	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2023, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
414	Rencana Strategis	Berupa informasi RENSTRA BPBAP Situbondo 2020-2024	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2020, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

415	Perjanjian Kinerja	Berupa informasi Perjanjian Kinerja	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2022, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
416	Laporan Kinerja	Berupa informasi laporan kinerja BPBAP	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2022, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
417	Laporan Tahunan	Berupa laporan tahunan	BPBAP Situbondo	Kepala BPBAP Situbondo	tahun 2021, Situbondo	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
418	Profil Sejarah BPBAP Takalar	Berupa informasi BPBAP Takalar	BPBAP Takalar	Kepala BPBAP Takalar	tahun 2023, Takalar	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun setelah dinilai kembali
419	Profil Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi	Berupa Visi dan Misi Organisasi	BPBAP Takalar	Kepala BPBAP Takalar	tahun 2023, Takalar	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali

420	Profil Struktur Organisasi BPBAP Takalar	Berupa struktur organisasi BPBAP Takalar	BPBAP Takalar	Kepala BPBAP Takalar	tahun 2023, Takalar	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
421	Profil SDM BPBAP Takalar	Berupa informasi Data Pejabat Struktural dan Fungsional BPBAP Takalar	BPBAP Takalar	Kepala BPBAP Takalar	tahun 2023, Takalar	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
422	Profil Fasilitas BPBAP Takalar	Berupa informasi fasilitas BPBAP Takalar	BPBAP Takalar	Kepala BPBAP Takalar	tahun 2023, Takalar	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
423	Komoditas Unggulan BPBAP Takalar	Berupa informasi komoditas	BPBAP Takalar	Kepala BPBAP Takalar	tahun 2023, Takalar	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
424	Leaflet Budidaya	Berupa informasi Leaflet Budidaya	BPBAP Takalar	Kepala BPBAP Takalar	tahun 2023, Takalar	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

425	Profil Laboratorium Uji Kesehatan Ikan dan Lingkungan BPBAP Takalar	Informasi Profil Laboratorium Uji Kesehatan Ikan dan Lingkungan BPBAP Takalar	BPBAP Takalar	Kepala BPBAP Takalar	tahun 2023, Takalar	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
426	Perjanjian Kinerja	Berupa informasi Perjanjian Kinerja Tahunan BPBAP	BPBAP Takalar	Kepala BPBAP Takalar	tahun 2023, Takalar	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
427	Renstra BPBAP Takalar	Informasi Rencana Strategis B	BPBAP Takalar	Kepala BPBAP Takalar	tahun 2023, Takalar	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
428	Laporan Capaian Kinerja	Berupa laporan capaian kinerja BPBAP Takalar	BPBAP Takalar	Kepala BPBAP Takalar	tahun 2023, Takalar	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
429	Laporan Kinerja	Berupa laporan kinerja BPBAP Takalar	BPBAP Takalar	Kepala BPBAP Takalar	tahun 2023, Takalar	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

430	Laporan Tahunan	Berupa laporan tahunan BPBAP Takalar	BPBAP Takalar	Kepala BPBAP Takalar	tahun 2023, Takalar	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
431	Informasi Hoax di Twitter	Berupa informasi Hoax BPBAP Takalar di twitter	BPBAP Takalar	Kepala BPBAP Takalar	tahun 2023, Takalar	<i>Soft Copy</i>	Selama Twitter BPBAP Takalar di update
432	Standar Pelayanan BPBAP Takalar	Berupa informasi standar pelayanan BPBAP Takalar	BPBAP Takalar	Kepala BPBAP Takalar	tahun 2023, Takalar	<i>Soft Copy</i>	1 tahun dinilai kembali
433	Survei Kepuasan Masyarakat Per triwulan	Berupa laporan SKM BPBAP Takalar	BPBAP Takalar	Kepala BPBAP Takalar	tahun 2023, Takalar	<i>Soft Copy</i>	1 tahun dinilai kembali
434	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Berupa informasi SOP BPBAP Takalar	BPBAP Takalar	Kepala BPBAP Takalar	tahun 2023, Takalar	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah dinilai kembali

435	Profil Sejarah BPBL Batam	BPBL Batam	BPBL Batam	Kepala BPBL Batam	tahun 2023, Batam	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun setelah dinilai kembali
436	Visi, Misi	Berupa Visi dan Misi BPBL Batam	BPBL Batam	Kepala BPBL Batam	tahun 2023, Batam	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
437	Tupoksi	Berupa Tupoksi BPBL Batam	BPBL Batam	Kepala BPBL Batam	tahun 2023, Batam	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun dinilai kembali
438	Struktur Organisasi BPBL Batam	Berupa informasi Struktur Organisasi BPBL Batam	BPBL Batam	Kepala BPBL Batam	tahun 2023, Batam	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
439	Wilayah Kerja	Berisi informasi Wilayah Kerja BPBL Batam	BPBL Batam	Kepala BPBL Batam	tahun 2023, Batam	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali

440	Sarpras dan SDM	Berisi informasi Sarpras dan SDM	BPBL Batam	Kepala BPBL Batam	tahun 2023, Batam	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
441	Perjanjian Kinerja 2022	Berisi informasi Perjanjian Kinerja 2022 BPBL Batam	BPBL Batam	Kepala BPBL Batam	tahun 2022, Batam	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
442	Renstra BPBL Batam 2020-2024	Berupa informasi Renstra BPBL Batam 2020-2024	BPBL Batam	Kepala BPBL Batam	tahun 2020, Batam	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
443	Laporan Capaian Kinerja	Berupa informasi Laporan Capaian Kinerja BPBL Batam	BPBL Batam	Kepala BPBL Batam	tahun 2023, Batam	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
444	Laporan SKM	Berisi informasi Laporan SKM Terhadap Pelayanan Publik BPBL Batam	BPBL Batam	Kepala BPBL Batam	tahun 2023, Batam	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

445	Maklumat, Janji, visi misi dan Motto pelayanan	Berisi informasi Maklumat, Janji, Visi Misi dan Moto Pelayanan BPBL Batam	BPBL Batam	Kepala BPBL Batam	tahun 2023, Batam	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
446	Penjualan hasil produksi dan Uji Lab	Berupa informasi Penjualan Hasil Produksi dan Uji Lab	BPBL Batam	Kepala BPBL Batam	tahun 2023, Batam	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
447	Laporan SPIP	Berupa informasi Laporan SPIP	BPBL Batam	Kepala BPBL Batam	tahun 2022, Batam	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
448	Ikan Bawal Bintang	Informasi Komoditas Bawal Bintang	BPBL Batam	Kepala BPBL Batam	tahun 2023, Batam	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
449	Ikan Kakap Putih	Informasi Komoditas Kakap Putih	BPBL Batam	Kepala BPBL Batam	tahun 2023, Batam	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

450	Ikan Hias Nemo	Informasi Pembernihan Ikan Hias Nemo	BPBL Batam	Kepala BPBL Batam	Tahun 2023, Batam	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
451	Pengaduan Masyarakat	Berupa Formulir Masyarakat BPBL Batam	BPBL Batam	Kepala BPBL Batam	Tahun 2023, Batam	<i>Soft Copy</i>	1 tahun dinilai kembali
	Sejarah	Berupa Sejarah BPKIL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Batam	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun setelah dinilai kembali
452	Kedudukan, Tugas Dan Fungsi LP2IL Serang	Berupa informasi Kedudukan, Tugas Dan Fungsi LP2IL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Batam	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun setelah dinilai kembali
453	Visi & Misi LP2IL Serang	Berupa Visi & Misi BPKIL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Serang	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali

454	Struktur Organisasi	Berupa Struktur BPKIL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Serang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
455	Komitmen LP2IL Serang		BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang		<i>Soft Copy</i>	
456	Lokasi BPKIL Serang	Berupa Lokasi BPKIL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Serang	<i>Soft Copy</i>	Lima tahun setelah penciptaan arsip dilakukan
457	Layanan Chat Whatsapp	Berupa Layanan Chat Whatsapp BPKIL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun dinilai kembali
458	Keragaan SDM BPKIL Serang	Berupa Informasi Sumber Daya Manusia BPKIL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2022, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

459	Maklumat Pelayanan BPKIL Serang	Berupa Maklumat Pelayanan BPKIL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2022, Serang	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
460	Maklumat Standar Pelayanan BPKIL Serang	Berupa Standar Pelayanan Publik	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2022, Serang	<i>Soft Copy</i>	Setelah diterbitkan SK terbaru
461	SOP Penanganan Pengaduan	Berupa Layanan Pengaduan BPKIL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2020, Serang	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah dinilai kembali
462	Maklumat PPID	Berupa Maklumat PPID BPKIL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2022, Serang	<i>Soft Copy</i>	1 Tahun + 4 Tahun nilai kembali
463	Profil PPID BPKIL Serang	Berupa PPID BPKIL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Serang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali

464	Regulasi terkait PPID	Berupa Regulasi PPID BPKIL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Serang	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
465	SOP PPID Pusat	Berupa Informasi SOP PPID Pusat	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Serang	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah dinilai kembali
466	SOP Unit Kerja	Berupa Informasi SOP Unit Kerja	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Serang	<i>Soft Copy</i>	1 tahun setelah dinilai kembali
467	Formulir PPID	Berupa Forumulir PPID BPKIL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Serang	<i>Soft Copy</i>	1 tahun dinilai kembali
468	Layanan Pengujian Lab. Kualitas Air LP2IL Serang	Berupa Informasi & Layanan Laboratorium Kualitas Air BPKIL Serang Gateway	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun dinilai kembali

469	Layanan Pengujian Lab. Obat dan Residu LP2IL Serang	Berupa Informasi Lab. Obat & Residu BPKIL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
470	Layanan Pengujian Lab. Patologi LP2IL Serang	Berupa Informasi Lab. Patologi BPKIL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
471	Layanan Pengujian Lab. Mikrobiologi LP2IL Serang	Berupa Informasi Lab. Mikrobiologi BPKIL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
472	Layanan Uji Lapang Obat Ikan LP2IL Serang	Berupa Informasi Uji Lapang Obat Ikan	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
473	Layanan Laboratorium Keliling LP2IL Serang	Berupa Informasi Lab. Keliling LP2IL	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

474	Company Profile LP2IL Serang	Berupa Informasi LP2IL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2020, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
475	Sertifikat Akreditasi LP2IL Serang	Berupa Sertifikat Akreditasi BPKIL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2021, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
476	Tarif Pengujian LP2IL Serang	Informasi Tarif Pengujian LP2IL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2021, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
477	Infografis APK Buku Saku Penyakit Ikan LP2IL Serang	Infografis APK Buku Saku Penyakit Ikan LP2IL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2021, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
478	Infografis Smart Kit Fosfat dan Nitrit LP2IL Serang	Infografis Smart Kit Fosfat dan Nitrit LP2IL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	tahun 2021, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

479	Infografis Poliklonal Antibodi LP2IL Serang	Infografis Poliklonal Antibodi LP2IL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	tahun 2021, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
480	Perjanjian Kinerja Kepala LP2IL Serang Tahun 2019	Perjanjian Kinerja Kepala LP2IL Serang Tahun 2019	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	tahun 2019, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
481	Laporan SPIP Tahun 2021	Dokuman Laporan SPIP Tahun 2021	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	tahun 2021, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
482	Renstra LP2IL Serang Tahun 2020-2024	Renstra LP2IL Serang Tahun 2020-2024	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2020, Serang	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
483	Renja LP2IL Serang Tahun 2022	Renja LP2IL Serang Tahun 2022	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2022, Serang	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip

484	RKA-KL LP2IL Serang Tahun 2023	Data RKA-KL LP2IL Serang Tahun 2023	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	Tahun 2023, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
485	Pedoman Internal lingkup BPKIL Serang	Pedoman Internal lingkup BPKIL Serang	BPKIL Serang	Kepala BPKIL Serang	tahun 2021, Serang	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
486	Profil Organisasi	Sejarah Pembentukan Ditjen PDSPKP, Daftar Dirjen PDSPKP, Visi Misi, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Profil Pejabat	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
487	Profil Pejabat Ditjen PDSPKP	Nama, Jabatan, Alamat Email, Tanggal Lahir, Pengalaman, Pendidikan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
488	Informasi Pegawai Ditjen PDSPKP	Jumlah Pegawai Ditjen PDS menurut jenis kelamin dan jenis jabatan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

489	DIPA Ditjen PDSPKP	Lampiran Surat Pengesahan DIPA	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
490	Laporan Kinerja	Lampiran laporan kinerja Ditjen PDSPKP	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
491	Agenda Kegiatan Ditjen PDSPKP	Agenda Kegiatan Prioritas Ditjen PDSPKP	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
492	Renstra Ditjen PDSPKP	Lampiran Renstra Ditjen PDSPKP	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
493	Rencana Kerja Tahunan	Lampiran Keputusan Dirjen PDSPKP tentang Rencana Kerja Tahunan Ditjen PDSPKP	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

494	Ringkasan Laporan Keuangan	Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen PDSPKP	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
495	Perjanjian Kinerja	Lampiran isi Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP per Tahun	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
496	Ringkasan Informasi Program/Kegiatan Ditjen PDSPKP	Paparan Arah Kebijakan dan Program Prioritas Ditjen PDSPKP	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
497	LHKPN Pimpinan Ditjen PDSPKP	LHKPN Dirjen PDSPKP	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
498	Dokumen Pendukung Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Kajian/Naskah Akademik terhadap penyusunan Rancangan Peraturan, Laporan Konsultasi Publik	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

499	Peraturan Direktur Jenderal	Keputusan dan Draf SK yang diterbitkan Dirjen PDSPKP	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
500	Pedoman Personil	Kumpulan Regulasi yang Mengatur Kepegawaian Pemerintah	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
501	Pedoman Pengelolaan Anggaran	Panduan Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Satu DIPA	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
502	Tata Cara Pelayanan dan Permohonan Informasi	Mekanisme Memperoleh Informasi, Pengajuan Keberatan, Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi, Form Permohonan Informasi, Form Permohonan Keberatan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
503	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Ditjen PDSPKP maupun	Tata Cara Pelaporan Gratifikasi, Pelaporan Whistle Blower System, Infografis Layanan Laporan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

	pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Ditjen PDSPKP						
504	Informasi tentang <u>Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</u>	Pengumuman pengadaan menuju ke link ke http://lpse.kkp.go.id/eproc4 dan pengumuman pengadaan jasa lainnya perorangan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP		<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
505	Informasi Bantuan Pemerintah Ditjen PDSPKP	Petunjuk Teknik Bantuan Pemerintah Mendukung Program/Kegiatan Ditjen PDSPKP bersumber dari APBN	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP		<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
506	Pengumuman Logo Gemarikan Baru	Informasi logo gemarikan yang baru dan file unduhan logo	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
507	Pengumuman SiRUP (aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based))	Informasi rencana pengadaan barang dan jasa melalui link https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap/klpd/K8	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

508	Jadwal Bazar Produk Perikanan dan Kuliner	Pengumuman jadwal bazar selama 1 tahun	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
509	Agenda Bursa Ikan Hias dan Kontes Ikan Hias	Pengumuman Agenda bursa ikan hias dan kontes ikan hias yang diselenggarakan di Raiser Ikan Hias Cibinong Bogor	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
510	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	Rancangan dan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan atas usulan Ditjen PDSPKP	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
511	Daftar Perjanjian Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang dikeluarkan Ditjen PDSPKP	Tabel Rekap Judul, Nomer Perjanjian, Pihak yang Terlibat, tanggal berlaku	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
512	Pengumuman Advokasi Hukum	Maksud tujuan, dasar hukum dan tata cara	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

513	Jurnal Pasca Panen Perikanan	Pengumuman Penulisan Jurnal Pasca Panen dikelola BBBP3KP	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
514	Laporan hasil pertemuan pejabat/pegawai dengan masyarakat, baik di dalam suatu forum (konsultasi publik/FGD) atau kunjungan kerja biasa	Berupa kategori berita dari kegiatan yang telah dilaksanakan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
515	Profil Potensi Usaha dan Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan di Daerah	Profil potensi usaha dan peluang investasi kelautan dan perikanan di setiap provinsi	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
516	Profil Potensi Usaha dan Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan Menurut Bidang Usaha	Profil bidang penangkapan tuna, pengolahan rumput laut, budidaya udang	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
517	Pengumuman Tata Cara Pelaporan Gratifikasi	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Ditjen PDSPKP	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

518	Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan	Pengertian, maksud dan tujuan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
519	Pendaftaran Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan di website BBP2HP	Kriteria calon peserta dan link cara mendaftar	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
520	Info Harga Ikan	Rata-rata harga ikan bulanan di Tingkat Konsumen di 14 Provinsi	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
521	Trend ekspor impor produk perikanan	Trend nilai dan volume ekspor hasil perikanan secara periodik	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
522	Angka Konsumsi Ikan	Jumlah AKI dengan Perbandingan Provinsi dan Tahun yang diakses melalui https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=aki&i=209	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

523	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan	Pengertian, hasil perhitungan per tahun sejak tahun 2016, dan arti nilainya	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
524	Realisasi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan	Realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan secara periodik	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
525	Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan	Capaian Pembiayaan Sektor KP yang telah disalurkan secara periodik	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
526	Informasi SIUP Bidang Pemasaran Hasil Perikanan	Berisi tentang mekanisme menerbitkan SIUP Bidang Pemasaran Hasil Perikanan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
527	Informasi SKP On line	Masuk ke link https://skp-pdspkp.kkp.go.id/	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

528	Informasi Penerbitan SPPT SNI Produk Perikanan	Prosedur Penerbitan SPPT SNI Produk Perikanan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
529	Informasi SIUP Bidang Pengolahan Perikanan	Informasi mekanisme perijinan berusaha sub sektor pengolahan ikan berbasis risiko	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
530	Standar Penerbitan Pemasaran Perikanan	Komponen Standar Pelayanan Penerbitan SIUP Bidang Pemasaran Hasil Perikanan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
531	Standar Penerbitan Kelayakan (SKP)	Komponen Standar Pelayanan Penerbitan SKP	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
532	Standar Penerbitan Pengolahan Perikanan	Komponen Standar Pelayanan Penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

533	Mekanisme pengurusan bantuan pemerintah	Infografis mekanisme pengusulannya, jenis bantuan, spesifikasi bantuan dan kriteria calon pengelola bantuan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
534	Indeks Masyarakat SIUP Bidang Hasil Perikanan Kepuasan Pelanggan Pemasaran	Nilai dari indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan SIUP Bidang Pemasaran Hasil Perikanan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
535	Indeks Masyarakat SKP On Line Kepuasan Pelanggan	Nilai dari indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan SKP On Line	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
536	Indeks Masyarakat SPPT SNI Perikanan Kepuasan Pelanggan Produk	Nilai dari indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan SPPT SNI Produk Perikanan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
537	Kumpulan Leaflet Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	Kumpulan leaflet dari produk inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan yang dihasilkan BBP3KP	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

538	Infografis Ragam Manfaat 5 Komoditas Produk Perikanan (udang, kepiting, pangasius, tuna, cumi, sotong dan gurita)	Infografis kandungan dan manfaat gizi, nilai dan tujuan ekspor	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
539	Video Ragam Baru Produk Hasil KP	Berisi aneka olahan hasil kelautan dan perikanan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
540	Video Cara Pengolahan Ikan yang Baik	Berisi cara pengolahan ikan yang baik untuk mendapatkan produk yang aman dikonsumsi	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
541	Video Tips Menjaga Kesehatan Ikan	Berisi cara menjaga kesehatan ikan untuk mendapatkan produk yang aman dikonsumsi	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
542	Infografis Ciri Ikan Segar Berformalin	Berisi pengetahuan ciri ikan segar berformalin untuk mengantisipasi mendapatkan produk yang tidak layak konsumsi	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP		<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

543	Video Ragam Olahan berbasis Ikan Lele	Berisi aneka olahan berbasis ikan lele	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
544	Video Proses Pengolahan Udang	Berisi kandungan, manfaat udang dan ajakan makan ikan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
545	Video Ayo Makan Ikan Kembang	Berisi kandungan, manfaat gizi ikan kembang dan ajakan makan ikan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
546	Video Ayo Makan Ikan Bandeng	Berisi kandungan, manfaat gizi ikan bandeng dan ajakan makan ikan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
547	Video Ayo Makan Ikan Patin	Berisi kandungan, manfaat gizi ikan patin dan ajakan makan ikan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

548	Video Pasar Ikan Modern Muara Baru	Menceritakan kondisi pasar ikan lama dan kondisi terkini PIM Muara Baru	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
549	Video Pembangunan SKPT Mimika	Menceritakan bantuan KKP yang diberikan untuk SKPT Mimika saat Ditjen PDSPKP menjadi penanggung jawab SKPT	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
550	Video Aneka Produk Perikanan Berbahan Dasar Fish Jelly	Menceritakan olahan ikan berbahan dasar fish jelly	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
551	Video Pembangunan SKPT Biak	Menceritakan bantuan KKP yang diberikan untuk SKPT Biak saat Ditjen PDSPKP menjadi penanggung jawab SKPT	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
552	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Direktorat Usaha dan Investasi	Informasi progress kinerja Direktorat Usaha dan Investasi meliputi Nilai Pembiayaan, Nilai Investasi	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

553	Capaian SKP	Perkembangan capaian penerbitan SKP setiap tahun	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
554	Informasi RSNI	Berisi tentang judul RSNI	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
555	Juknis Bedah UKM	Berisi tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Bedah UKM yang dibiayai DAK	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
556	Data Pembina Mutu Terdaftar	Berisi nama dan lokasi pembina mutu yang ditetapkan Ditjen PDSPKP	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
557	Laporan Pelaksanaan SKPT Mimika	Berisi tentang informasi perkembangan SKPT Mimika saat Ditjen PDSPKP menjadi penanggung jawab	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

558	Leaflet Sistem Resi Gudang (SRG)	Berisi informasi tentang skema bisnis, mekanisme penerbitan SRG, kelembagaan, jenis komoditas, tahapan menjadi pengelola SRG ikan, dan manfaat implementasi SRG	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
559	Video Bantuan Pemerintah Gudang Rumput Laut, Cold Storage, Ice Flake Machine (IFM)	Berisi informasi tentang lokasi, jenis bantuan, kapasitas dan pengelola bantuan pemerintah Gudang Rumput Laut, Cold Storage, IFM	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
560	Daftar UPI yang sudah ber-SKP	Berisi nama dan alamat UPI yang memiliki SKP	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
561	Daftar SNI produk perikanan dan produk perikanan non pangan	Berisi judul dan nomor kode SNI	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
562	Success Story HTCA	Berisi informasi tentang keberhasilan komisi teknis Ditjen PDSPKP memperoleh penghargaan HTCA dari BSN	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

563	Success Story FAFI - FAO	Berisi informasi tentang keberhasilan UKM Bidang Pengolahan Hasil Perikanan yang mengikuti program FAFI-FAO	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
564	Daftar UPI skala menengah dan besar	Berisi informasi nama dan alamat UPI skala menengah dan besar	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
565	Sarana, prasarana dan layout yang diperlukan untuk UPI per jenis olahan skala mikro dan kecil	Berisi informasi tentang layout UPI skala mikro dan kecil beserta kebutuhan sarana prasarananya menurut jenis olahan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
566	Profil UKM unggulan	Berisi daftar UKM unggulan yang dibina Ditjen PDSPKP	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
567	Data jumlah UKM	Berisi informasi sebaran jumlah UKM bidang pengolahan hasil perikanan per provinsi	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

568	Daftar Cold Storage yang Dibangun Pemerintah	Berisi informasi tentang lokasi dan kapasitas cold storage yang dibangun pemerintah	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
569	Daftar penyedia jasa logistik (darat, laut dan udara)	Berisi informasi tentang nama dan alamat penyedia jasa logistik	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
570	Perkembangan informasi stok ikan di coldstorage	Berisi informasi tentang utilitas cold storage di beberapa lokasi dan komposisi dan sebaran stok berdasarkan jenis ikan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
571	SOP terkait pelayanan publik di unit pelaksana teknis BBP3KP	Informasi tentang mekanisme pengujian produk hasil perikanan, mekanisme sertifikasi produk, dan mekanisme bimtek/pelatihan)	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
572	Buku Statistik Ekspor Produk Perikanan Nasional	Informasi Nilai dan Volume Ekspor Produk Perikanan yang disajikan dengan kurun waktu 5 tahun	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

573	Buku Statistik Impor Produk Perikanan Nasional	Informasi Nilai dan Volume Impor Produk Perikanan yang disajikan dengan kurun waktu 5 tahun	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
574	Protokol Kesehatan di Bidang PDSPKP	Informasi berupa pedoman protokol kesehatan di area pemasaran, lingkungan kerja Ditjen PDSPKP, dan unit pengolahan ikan	Direktorat Jenderal PDSKP	Direktur Jenderal PDSPKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
575	Sejarah PSDKP	Berupa Sejarah PSDKP	Direktorat Jenderal PSDKP	Direktur Jenderal PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
576	Visi Misi	Berupa Visi Misi	Direktorat Jenderal PSDKP	Direktur Jenderal PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
577	Tugas dan Fungsi	Berupa Tugas dan Fungsi	Direktorat Jenderal PSDKP	Direktur Jenderal PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

578	Kedudukan/ Alamat	Berupa Kedudukan/ Alamat	Direktorat Jenderal PSDKP	Direktur Jenderal PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
579	Struktur Organisasi	Informasi Struktur Organisasi	Direktorat Jenderal PSDKP	Direktur Jenderal PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
580	Laporan Kinerja Akuntabilitas	Laporan Akuntabilitas Kinerja	Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
581	Laporan Kegiatan (tahunan/ bulanan)	Laporan Kegiatan (tahunan/ bulanan)	Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
582	Data Jumlah dan Sebaran Pokmaswas	Data Jumlah dan Sebaran Pokmaswas	Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

583	Data Hasil Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Data Hasil Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
584	Data Hasil Pemulangan Nelayan yang tertangkap di Luar Negeri	Data Hasil Pemulangan Nelayan yang tertangkap di Luar Negeri	Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
585	Rencana Strategis	Informasi Rencana Strategis	Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
586	DIPA dan RKAKL	Informasi DIPA dan RKAKL	Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
587	Keragaan SDM	Data Keragaan SDM	Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

588	Kelembagaan PSDKP	Data Kelembagaan PSDKP	Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
589	Keragaan Infrastruktur Pengawasan	Informasi Keragaan Infrastruktur Pengawasan	Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
590			Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
591			Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
592			Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

593			Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
594	Peraturan/ Keputusan Direktur Jenderal PSDKP	Informasi Peraturan/ Keputusan Direktur Jenderal PSDKP	Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
595			Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
596			Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
597	Perjanjian Kerja Sama Ditjeb PSDKP Dengan Instansi Terkait	Informasi Perjanjian Kerja Sama Ditjeb PSDKP Dengan Instansi Terkait	Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

598			Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
599	Prosedur Pelayanan Surat Aktivasi Transmitter SLO	Informasi Prosedur Pelayanan Surat Aktivasi Transmitter SLO	Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
600	Prosedur Pelayanan Surat Aktivasi Transmitter SLO	Informasi Prosedur Pelayanan Surat Aktivasi Transmitter SLO	Direktorat Jenderal PSDKP	Ditjen PSDKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
601	Profil/sejarah Itjen	Profil/Sejarah berdirinya Itjen KKP	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun dinilai kembali
602	Visi Misi	Berupa Visi Misi	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun dinilai kembali

603	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi lingkup Itjen	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun dinilai kembali
604	Tugas dan Fungsi	Tugas dan Fungsi Itjen	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun dinilai kembali
605	Alamat Kantor	Informasi Alamat Kantor	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun dinilai kembali
606	Program dan Kegiatan (Renstra/Renja)	Berupa Program dan Kegiatan (Renstra/Renja)	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
607	Laporan Kinerja/Tahunan	Berupa Laporan Kinerja/Tahunan	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

608	Penghargaan yang didapatkan	Penghargaan yang didapatkan	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
609	Laporan Keuangan dan BMN	Berupa data Laporan Keuangan dan BMN	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
610	Daftar Informasi Publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan	Daftar Informasi Publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
611	Informasi Peraturan/SOP Pengawasan Itjen	Peraturan/keputusan Irjen yang berlaku	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
612	Profil Kepegawaian eselon I s.d Eselon III, Auditor Utama	Profil pejabat Itjen	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

613	Kode Etik Pegawai Itjen	Informasi Kode Etik Pegawai Itjen	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
614	Piagam Pengawasan Intern KKP	Berupa Piagam Pengawasan Intern KKP	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
615	Peraturan/Keputusan Irjen	Peraturan/Keputusan Irjen yang berlaku	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
616	PKPT	Berupa informasi pengawasan Itjen	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Tahun 2017, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	20 Tahun setelah menjadi arsip
617	Siaran Pers	Siaran Pers Yang Sudah dirilis	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

618	Berita dan Artikel	Berita dan Artikel yang sudah diposting	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
619	Perjanjian Kinerja	Berupa Informasi Perjanjian Kinerja	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
620	Dokumentasi Kegiatan Itjen	Foto kegiatan Itjen	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
621	Infografis	Berupa informasi Infografis	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
622	Struktur Organisasi BRSDM	Informasi Satuan Kerja BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun dinilai kembali

623	Profil Satuan Kerja BRSDM	Informasi Satuan Kerja BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	
624	Daftar Alamat Satuan Kerja BRSDM	Informasi Satuan Kerja BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun dinilai kembali
625	Profil singkat Pejabat	Informasi Satuan Kerja BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun dinilai kembali
626	Gambaran Umum BRSDM dan UPT	Informasi Satuan Kerja BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun dinilai kembali
627	Capaian Kinerja BRSDM KP	Laporan Program/Kegiatan/Kinerja	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

628	Program Kegiatan	Laporan Program/Kegiatan/Kinerja	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
629	Target/Capaian Program Kegiatan	Laporan Program/Kegiatan/Kinerja	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
630	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Laporan Program/Kegiatan/Kinerja	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	
631	Anggaran Program (jumlah dan sumber)	Laporan Program/Kegiatan/Kinerja	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
632	Agenda Tugas BRSDM	Laporan Program/Kegiatan/Kinerja	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

633	Realisasi Kegiatan	Laporan Program/Kegiatan/Kinerja	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
634	Rencana Strategis BRSDM	Laporan Program/Kegiatan/Kinerja	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
635	Rencana Kerja BRSDM	Laporan Program/Kegiatan/Kinerja	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
636	Perjanjian Kinerja BRSDM	Laporan Program/Kegiatan/Kinerja	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
637	Rencana Aksi	Laporan Program/Kegiatan/Kinerja Rencana Aksi	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip

638	Rencana Kerja	Laporan Program/Kegiatan/Kinerja Rencana Kerja	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
639	Indikator Kinerja	Laporan Program/Kegiatan/Kinerja Akuntabilitas Kinerja	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
640	Laporan Kinerja Akuntabilitas	Laporan Program/Kegiatan/Kinerja Akuntabilitas Kinerja	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
641	Laporan Tahunan (Manajerial dan Riset)	Laporan Program/Kegiatan/Kinerja (Manajerial dan Riset)	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
642	Laporan Penyelenggaraan SAKIP	Laporan Program/Kegiatan/Kinerja Penyelenggaraan SAKIP	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip

643	Rencana dan Laporan realisasi anggaran	Laporan Keuangan realisasi anggaran	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
644	Neraca	Laporan Keuangan Neraca	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
646	Pagu Anggaran Tahun Lingkup BRSDM KP	Laporan Keuangan Lingkup BRSDM KP	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
647	Realisasi Anggaran Tahun Lingkup BRSDM KP	Laporan Keuangan Lingkup BRSDM KP	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
648	Laporan PNBP BRSDM	Laporan Keuangan PNBP BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip

649	Laporan PBJ BRSDM	Laporan Keuangan PBJ BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
650	Laporan PHLN BRSDM	Laporan Keuangan PHLN BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
651	Permintaan informasi Publik	Akses Informasi Publik	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
652	Jadwal Pelayanan	Akses Informasi Jadwal Pelayanan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
653	Jumlah yang dikabulkan dan Tidak	Akses Informasi Jumlah yang dikabulkan dan Tidak	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

654	Tata Cara Pengaduan	Informasi Tata Cara Pengaduan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
655	Form Pengaduan	Form Pengaduan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
656	Tata Cara Keberatan	Informasi Tata Cara Keberatan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
657	Form Keberatan	Form Keberatan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
658	Data statistik layanan informasi publik	Akses Informasi layanan informasi publik	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

659	Jenis Layanan di BRSDM	Akses Informasi Jenis Layanan di BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
660	Informasi Pelayanan Publik (Standar pelayanan publik, maklumat, Jenis dan tarif layanan) PPID	Akses Informasi Pelayanan Publik (Standar pelayanan publik, maklumat, Jenis dan tarif layanan) PPID	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
661	Informasi Pelayanan Publik (Standar pelayanan publik, maklumat, Jenis dan tarif layanan) Pelayanan Publik	Akses Informasi Pelayanan Publik (Standar pelayanan publik, maklumat, Jenis dan tarif layanan) Pelayanan Publik	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
662	Hasil Kuisisioner Survey Kepuasan Masyarakat	Akses Informasi Kuisisioner Survey Kepuasan Masyarakat	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
663	Fasilitas Kapal Latih BRSDM Lingkup BRSDM KP	Data Statistik Fasilitas Kapal Latih BRSDM Lingkup BRSDM KP	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

664	Data Jumlah dan statistik Pegawai Lingkup BRSDM KP Menurut Unit Kerja	Data Statistik Pegawai Lingkup BRSDM KP Menurut Unit Kerja	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
665	Data Jumlah dan statistik Pegawai Lingkup BRSDM KP Menurut Jenis Jabatan	Data Statistik Pegawai Lingkup BRSDM KP Menurut Jenis Jabatan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
666	Data Jumlah dan statistik Pegawai Lingkup BRSDM KP Menurut Status Pegawai	Data Statistik Pegawai Lingkup BRSDM KP Menurut Status Pegawai	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
667	Data Jumlah dan statistik Pegawai Lingkup BRSDM Menurut Jenis Kelamin	Data Statistik Pegawai Lingkup BRSDM Menurut Jenis Kelamin	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
668	Data Jumlah dan statistik Pegawai Menurut Unit Kerja dan Golongan/ Ruang	Data Statistik Pegawai Menurut Unit Kerja dan Golongan/ Ruang	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

669	Data Jumlah dan statistik Pegawai Menurut Unit Kerja dan Tingkat Pendidikan	Data Statistik Pegawai Menurut Unit Kerja dan Tingkat Pendidikan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
670	Data Jumlah dan statistik Pegawai Menurut Unit Kerja dan Kelompok Umur	Data Statistik Pegawai Menurut Unit Kerja dan Kelompok Umur	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
671	Data Jumlah dan statistik Pegawai Menurut Unit Kerja dan Jabatan	Data Statistik Pegawai Menurut Unit Kerja dan Jabatan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
672	Data Jumlah dan statistik Jabatan Fungsional Lingkup BRSDM KP	Data Statistik Jabatan Fungsional Lingkup BRSDM KP	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
673	Data Jumlah dan statistik Paten Tersertifikat Lingkup BRSDM	Data Statistik Paten Tersertifikat Lingkup BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

674	Data Jumlah dan statistik Paten BRSDM Terdaftar	Data Statistik Paten BRSDM Terdaftar	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
675	Data Jumlah dan statistik Legislasi Lingkup BRSDM KP	Data Statistik Legislasi Lingkup BRSDM KP	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
676	Data , rencana, hibah statistik Bentuk dan Jenis Kerja Sama BRSDM KP	Data Statistik Bentuk dan Jenis Kerja Sama BRSDM KP	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
677	Data Jumlah dan statistik Publikasi AMAFRAD Press BRSDM KP	Data Statistik Publikasi AMAFRAD Press BRSDM KP	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
678	Laporan dan statistik Indeks Kepuasan Masyarakat PPID BRSDM	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat PPID BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

679	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik BRSDM	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
680	Laporan Masyarakat Pengaduan BRSDM lingkup	Laporan Pengaduan Masyarakat lingkup BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
681	laporan Pengelolaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup BRSDM	Laporan Pengelolaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
682	Karya Tulis Ilmiah	Laporan / Statistik Karya Tulis Ilmiah	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
683	Leaflet Hasil penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	Laporan/ Statistik Hasil penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

684	Brosur, leaflet, standing banner, PPID/layanan Publik	Brosur PPID/layanan Publik	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
685	Maklumat Pelayanan	Maklumat Pelayanan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
686	SK PPID BRSDM	SK PPID BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
687	SOP PPID BRSDM	SOP PPID BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
688	Keputusan Ka BRSDM	SK Keputusan Ka BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

689	Peraturan Ka BRSDM	Peraturan Ka BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
690	Pedoman Ka BRSDM	Pedoman Ka BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
691	Petunjuk Pelaksanaan	Juklak	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
692	Standar Operasional Prosedur (SOP)	SOP	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
694	Petunjuk Teknis	Juknis	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

695	Naskah Akademis/Kajian atau Pertimbangan yang Mendasari Terbitnya Peraturan	Naskah Akademik	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
696	Risalah Rapat, Rancangan Peraturan	Hasil Rapat/Rancangan Peraturan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
697	Tahap Perumusan Peraturan.	Tahap Perumusan Peraturan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
698	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	Surat Perjanjian pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
703	Rencana Umum Pengadaan diatas 200jt	Laporan Keuangan Pengadaan diatas 200jt	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip

704	Status Peringatan Dini	informasi Status Peringatan Dini	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
705	Data Satuan Pendidikan	Informasi Data Satuan Pendidikan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
706	Data Personal Peserta Didik	Informasi Data Personal Peserta Didik	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
708	Proses Seleksi Penerimaan Taruna (Jalur Umum dan Jalur Khusus) - Daftar Peserta - Data pribadi peserta ujian - SK penilaian - Data-data verifikasi dan seleksi	Informasi Proses Seleksi Penerimaan Taruna (Jalur Umum dan Jalur Khusus)	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
709	Data Anak Pelaku Utama	Informasi Data Anak Pelaku Utama	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip

710	Data Lulusan Taruna lingkup BRSDM	Informasi Data Lulusan Taruna lingkup BRSDM	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
711	Data Serapan Lulusan Taruna	Informasi Data Serapan Lulusan Taruna	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
712	Informasi terkait Desa Mitra Pusdik	Informasi Desa Mitra Pusdik	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
713	Daftar Hasil riset (Inovasi, Lab, Kepakaran, Publikasi)	Informasi Daftar Hasil riset (Inovasi, Lab, Kepakaran, Publikasi)	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
714	Kalender/Jadwal Akademik	Informasi Kalender/Jadwal Akademik	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

715	Kurikulum Akademik	Informasi Kurikulum Akademik	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
716	Pernyataan Kuliah	Informasi Pernyataan Kuliah	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
717	Tugas Akhir	Informasi Tugas Akhir	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
718	Daftar Nilai	Informasi Daftar Nilai	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
719	Registrasi Akademik	Informasi Registrasi Akademik	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

720	Beasiswa	Informasi Beasiswa	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
721	Kegiatan Taruna	Informasi Kegiatan Taruna	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
722	Bantuan Dana Kegiatan	Informasi Bantuan Dana Kegiatan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
723	<i>Sponsorship</i>	Informasi Sponsorship	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
724	Pelatihan/Seminar/Workshop Pendidikan KP	Informasi Pelatihan/Seminar/Workshop Pendidikan KP	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

725	Konsultasi Pendidikan KP	Informasi Konsultasi Pendidikan KP	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
726	Penelitian Pendidikan KP	Informasi Penelitian Pendidikan KP	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
727	Inovasi dan Pelatihan	Informasi Inovasi dan Pelatihan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
728	Panduan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen	Panduan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
729	Panduan Tugas Belajar	Panduan Tugas Belajar	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

730	Daftar Penerima Beasiswa	Informasi Daftar Penerima Beasiswa	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
731	Informasi stuktur organisasi Siswa	Informasi stuktur organisasi Siswa	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
732	Data Purnawidya Aparatur dan masyarakat	Informasi Data Purnawidya Aparatur dan masyarakat	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
733	Data Widyaiswara	Informasi Data Widyaiswara	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
734	Data Instruktur	Informasi Data Instruktur	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

735	Laporan Pengendalian Sistem Intern Pemerintah (SPIP)	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
736	Agenda Kegiatan Pelatihan	Agenda Kegiatan Pelatihan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
737	Daftar Sarana dan Prasarana	Daftar Sarana dan Prasarana	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
738	Daftar Workshop	Daftar Workshop	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
739	Informasi SDM Pelatih dan Tenaga Kepeleatihan	Informasi Jumlah dan Nama SDM Pelatih dan Tenaga Kepeleatihan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

740	Informasi SDM Penyuluh dan Tenaga Kependidikan	Informasi Jumlah dan Nama SDM Penyuluh dan Tenaga Kependidikan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
741	Daftar Asesor Kompetensi	Daftar Asesor Kompetensi di LSP 1 dan TUK	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
742	Informasi Diklat Kepelautan (Jadwal, Jenis, Tarif)	Informasi diklat kepelautan seperti BST, ANKAPIN/ATKAPIN maupun Upgrading SKK 30/60 Mil	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
743	Daftar Skema LSP 1	Daftar Skema LSP 1	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
744	Daftar hasil riset perikanan	Laporan Daftar Hasil Riset Perikanan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

745	Daftar hasil riset kelautan	Laporan Daftar hasil riset kelautan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
746	Daftar kegiatan riset pengolahan produk	Daftar kegiatan riset pengolahan produk	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
747	Daftar kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan	Daftar kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
748	Daftar Policy Brief/Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Daftar Policy Brief	BPPSDMKP	Kepala BPPSDMKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
749	BKIPM	- Profil - Struktur organisasi - Kontak	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun dinilai kembali

750	Sekretariat	- Profil - Struktur organisasi - Kontak	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun dinilai kembali
751	Puskari	- Profil - Struktur organisasi - Kontak	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun dinilai kembali
752	Pusat PM	- Profil - Struktur organisasi - Kontak	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun dinilai kembali
753	Pusat SSK	- Profil - Struktur organisasi - Kontak	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	1+4 tahun dinilai kembali
754	Tarif PNB	Informasi tarif PNB	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali

755	PPK Online	Informasi PPK Online	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
756	CKIB Online	Informasi CKIB Online	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
757	HACCP Online	Informasi HACCP Online	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
758	Maklumat Pelayanan	Infografis Maklumat Pelayanan	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
759	Standar Pelayanan	Informasi standar Pelayanan	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali

760	Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil perikanan Ekspor dan Domestik Keluar	Informasi Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil perikanan Ekspor dan Domestik Keluar	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
761	Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Impor	Informasi Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Impor	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
762	Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Masuk	Informasi Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Masuk	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
763	Penjaminan Kelayakan IKI Milik Pemerintah dan Badan Usaha	Informasi Penjaminan Kelayakan IKI Milik Pemerintah dan Badan Usaha	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
764	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (HACCP)	Informasi Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (HACCP)	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

765	Pengurusan Ijin Ekspor (Nomor Registrasi) Produk Perikanan ke Negara Mitra	Informasi Pengurusan Ijin Ekspor (Nomor Registrasi) Produk Perikanan ke Negara Mitra	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
766	Penyelenggaraan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Informasi Penyelenggaraan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
767	Penyediaan Jasa Pengujian Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Informasi Penyediaan Jasa Pengujian Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
768	Penyediaan Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif	Informasi Penyediaan Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
769	SOP Penerbitan HC Media Pembawa dan/atau HP Berbasis CKIB atau HACCP dan End Product Testing	Data SOP Penerbitan HC Media Pembawa dan/atau HP Berbasis CKIB atau HACCP dan end Product Testing	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali

770	SOP Penerbitan HC Media Pembawa atau HP Berbasis CKIB dan HACCP	Data SOP Penerbitan HC Media Pembawa atau HP Berbasis CKIB dan HACCP	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
771	SOP Penerbitan HC atau sertifikat Kesehatan ikan dan Produk Perikanan Domestik Untuk Pengeluaran Media Pembawa Berbasis End Product Testing	Data SOP Penerbitan HC atau sertifikat Kesehatan ikan dan Produk Perikanan Domestik Untuk Pengeluaran Media Pembawa Berbasis End Product Testing	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
772	SOP Penerbitan HC atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Untuk Pengeluaran Media Pembawa Berbasis CKIB	Data SOP Penerbitan HC atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Untuk Pengeluaran Media Pembawa Berbasis CKIB	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
773	SOP Penerbitan HC Ekspor untuk Hasil Perikanan	Data SOP Penerbitan HC atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Untuk Pengeluaran Media Pembawa Berbasis CKIB	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
774	SOP Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Impor Risiko Tinggi	Data SOP Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Impor Risiko Tinggi	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali

775	SOP Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Berisiko Rendah	Data SOP Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Berisiko Rendah	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
776	SOP Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Masuk	Data SOP Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Masuk	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
777	SOP Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI)	Data SOP Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI)	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
778	SOP Perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)	Data SOP Perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
779	SOP Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (HACCP)	Data SOP Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (HACCP)	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali

780	SOP Pengurusan Ijin Ekspor (Nomor Registrasi) Produk Perikanan Ke Negara Mitra	Data SOP Pengurusan Ijin Ekspor (Nomor Registrasi) Produk Perikanan Ke Negara Mitra	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
781	SOP Penyelenggaraan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Data SOP Penyelenggaraan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
782	SOP Penyediaan Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif.	Data SOP Penyediaan Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif.	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
783	Informasi SKM BKIPM	<u>Terhubung ke tautan Otoritas Kompeten di:</u> http://ok.bkipm.kkp.go.id/oky/index2.php	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
784	Layanan Pengaduan	<u>Terhubung ke tautan Laporan di:</u> https://www.lapor.go.id /	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali

785	Kep. Dirjen Perikanan Budidaya No. 162/KEP-DJPB/2017 tentang Tentang Laboratorium Acuan Dan Laboratorium Penguji Untuk Penyakit Tilapia Lake Virus (TILV) Dan Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)	Dokumen Kep. Dirjen Perikanan Budidaya No. 162/KEP-DJPB/2017 tentang Tentang Laboratorium Acuan Dan Laboratorium Penguji Untuk Penyakit Tilapia Lake Virus (TILV) Dan Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2017, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
786	Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Persiapan NSW Nomor: KEP-03.1/DV.EKON/NSW/6/2015	Dokumen Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Persiapan NSW Nomor: KEP-03.1/DV.EKON/NSW/6/2015	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2015, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
787	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP 541 Tahun 2014 tentang Fasilitas Kegiatan Fal (Facilitation) Di Bandar Udara Internasional	Dokumen Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP 541 Tahun 2014 tentang Fasilitas Kegiatan Fal (Facilitation) Di Bandar Udara Internasional	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2014, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip

788	Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dokumen Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2014, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
789	Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	Dokumen Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2014, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
790	Permendag No. 44/M-DAG/PER/T/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor	Dokumen Permendag No. 44/M-DAG/PER/T/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2012, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
791	Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil	Dokumen Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2013, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
792	Kepmen KKP No. 37/KEPMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (Cheilinus Undulatus)	Dokumen Kepmen KKP No. 37/KEPMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (Cheilinus Undulatus)	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2013, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip

793	Kep. Ka.BKIPM No. 13 Tahun 2022 tentang Agen Perubahan di Lingkungan BKIPM	Dokumen Kep. Ka.BKIPM No. 13 Tahun 2022 tentang Agen Perubahan di Lingkungan BKIPM	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2022, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
794	Kep. Ka.BKIPM No. 16 Tahun 2022 tentang Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BKIPM	Dokumen Kep. Ka.BKIPM No. 16 Tahun 2022 tentang Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BKIPM	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2022, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
795	Kep. Ka.BKIPM No. 67 Tahun 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi BKIPM	Dokumen Kep. Ka.BKIPM No. 67 Tahun 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi BKIPM	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2021, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
796	Kep. Ka.BKIPM No. 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi BKIPM Tahun 2022	Dokumen Kep. Ka.BKIPM No. 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi BKIPM Tahun 2022	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2022, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
797	Permen KP No. 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dokumen Permen KP No. 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2020, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip

798	Permen KP No. 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Dokumen Permen KP No. 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2020, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
799	Kepmen KP No. 127 Tahun 2021 tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	Dokumen Kepmen KP No. 127 Tahun 2021 tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2020, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
800	Kep. Ka.BKIPM No. 72 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Kesekretariatan Lingkup BKIPM	Dokumen Kep. Ka.BKIPM No. 72 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Kesekretariatan Lingkup BKIPM	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2021, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
801	Penataan Sistem Manajemen SDM	Informasi Penataan Sistem Manajemen SDM	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
802	Laporan SPIP BKIPM Triwulan I 2020	Informasi Laporan SPIP BKIPM Triwulan I 2020	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2020, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip

803	Laporan SPIP BKIPM Triwulan I 2020	Informasi Laporan SPIP BKIPM Triwulan I 2020	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2020, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
804	Laporan SPIP BKIPM Triwulan III 2020	Informasi Laporan SPIP BKIPM Triwulan III 2020	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2020, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
805	Laporan SPIP BKIPM Triwulan IV 2020	Informasi Laporan SPIP BKIPM Triwulan IV 2020	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2020, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
806	Permen KP No. 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dokumen Permen KP No. 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2021, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
807	Kep. Ka.BKIPM No. 71 Tahun 2021 tentang Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I dan UPT Lingkup BKIPM	Dokumen Kep. Ka.BKIPM No. 71 Tahun 2021 tentang Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I dan UPT Lingkup BKIPM	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2021, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip

808	Per Ka.BKIPM No. 2 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup BKIPM	Dokumen Per Ka.BKIPM No. 2 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup BKIPM	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2022, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
809	Peningkatan Kualitas Publik	Penataan Tata Lakasana (SOP BKIPM)	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2016, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
810	Quick Wins	Informasi Quick Wins	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
811	Undang-undang	Informasi Undang-undang	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
812	Peraturan Pemerintah	Data Peraturan Pemerintah	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip

813	Perpres/Inpres	Data Perpres/Inpres	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
814	Permen	Data Permen	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
815	Kepmen	Data Kepmen	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
816	Keputusan Kepala BKIPM	Data Keputusan Kepala BKIPM	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
817	Regulasi Negara Mitra	Informasi Regulasi Negara Mitra	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip

818	Perjanjian Kerjasama	Data Perjanjian Kerjasama	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
819	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Data Penataan Peraturan Perundang-undangan	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
820	IAS	Daftar Ikan Asing Invasif	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
821	LSP-PHPMI	Penjelasan singkat tentang LSP-PHPMI	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
822	SNI	Informasi SNI Ikan dan Mutu	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip

823	Perjanjian Kinerja	Informasi Perjanjian Kinerja	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
824	Laporan Kinerja	Informasi Laporan Kinerja BKIPM	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
825	Renstra/RKT	Informasi Renstra/RKT BKIPM	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
826	Pedoman Kinerja	Informasi Pedoman Kinerja BKIPM	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
827	Eksportir Terdaftar	Informasi Eksportir Terdaftar Pada Negara MRA	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip

828	Importir Terdaftar	Informasi Importir Terdaftar Pada Negara MRA	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
829	Registrasi	Berisi Informasi Registrasi Sitem Perkarantinaan	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
830	Notifikasi	Berisi Informasi Notifikasi Pembaruan Persyaratan Pemasukan Ikan Hidup	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
831	Persyaratan Negara Tujuan	Berisi Informasi Notifikasi Pembaruan Persyaratan Pemasukan Ikan Hidup	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	30 tahun setelah menjadi arsip
832	Album Foto	Berisi Foto dari Semua Program Kerja BKIPM	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip

833	Video	Berisi Informasi Program Kerja BKIPM	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
834	Infografis	Berisi Informasi Semua Infografis dalam BKIPM	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
835	Tulisan PHPI	Berisi Informasi dari Beberapa Jurnal Ilmiah Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
836	Umum	Berisi informasi Buku, Ebook, Majalah mengenai Info Layanan Masyarakat di BKIPM	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
837	Twitter	Akun Twitter @bkipm_kkp	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip

838	Foto	Berisi Foto Galeri Quarantine	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
839	Leaflet	Berisi informasi Leaflet mengenai Gejala, Penyakit dan Tips Mencegah Penyakit Histamin	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	10 tahun setelah menjadi arsip
840	Sisterkaroline (sistem terintegrasi karantina online)	Laporan real time kegiatan operasional pengiriman hasil perikanan yang tersertifikasi dari UPT BKIPM di seluruh Indonesia baik ekspor, impor dan antar daerah.	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun setelah menjadi arsip
841	e-PPID -Profil -Regulasi Informasi Publik	Informasi Profil KKP dan Regulasi Informasi Publik	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali
842	Frequently asked question (FAQ) terkait karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan	Berisi informasi Persyaratan Kesehatan yang dikeluarkan oleh BKIPM	BPPMHKP	Kepala BPPMHKP	tahun 2023, Jakarta	<i>Soft Copy</i>	5 tahun dinilai kembali



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024**

**TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024
6. tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**
- KESATU :** Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini.
- KEDUA :** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA :** Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2024
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : 1/PPID-KKP/III/2024

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK KKP
NOMOR: NOMOR : 1/PPID-KKP/III/2024

Pada hari Jumat, tanggal 15 bulan Maret tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
Sekretariat Jenderal					
Biro Perencanaan					
1.	Hasil identifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	Penyalahgunaan Informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Penipuan dan Pelanggaran Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Informasi Pribadi Calon Penerima Bantuan. 2. Mencegah Penipuan dan Pelanggaran Hukum 3. Data masih bersifat sementara sehingga belum bisa dibuka untuk publik 	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi					
2	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
3	Hasil Assesment Baperjakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

				seseorang.	
4	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
5	Arsip Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
6	Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) (metode seleksi, materi seleksi, sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian, seleksi kompetensi, laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman dan Penetapan Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) 2. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	25 Tahun Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
Biro Hukum					
7	Proses Penanganan Masalah Hukum di Lingkup KKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka hanya untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 3. Dapat dibuka ketika masalah hukum 	Dapat menghambat penanganan permasalahan hukum (Pidana, Perdata, TUN dan proses hukum lainnya)	Selesai masalah Hukum (Inkracht) Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

			tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap.		
8	Data Pegawai yang menjadi saksi, ahli, tersangka, terdakwa atau narapidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan j 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 	Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.	<p>Selesaiya masalah Hukum (Inkracht)</p> <p>Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi</p>
Biro Keuangan					
9	Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. 2. Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 	1. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit sehingga angka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang 2. Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Kelautan dan 	3 tahun setelah Undang Undang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diundangkan.

		<p>Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>masih dapat berubah.</p> <p>2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	Perikanan	
10	Data Penyelesaian Kerugian Negara	<p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya</p>	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dalam penyelesaian indikasi Kerugian Negara, diperlukan tahapan-tahapan penyelesaian oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang akan ditetapkan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara, yang akan memutuskan terdapat kelalaian/bukan kelalaian. Putusan tersebut akan	25 Tahun

				menjadi kewajiban bagi penanggung jawab kerugian negara tersebut baik berupa pembebanan maupun pembebasan pembebanan.	
11.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya 	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	KKP akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI sesuai dengan rekomendasi pada Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Unit Kerja terkait	25 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualan Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
Biro Umum dan PBJ					
12	<p>Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bersifat Terbatas, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian HPS 2. Spesifikasi Teknis 3. Rancangan Kontrak 4. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi 5. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan 6. Daftar Kuantitas dan Harga 7. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan 8. Gambar Rancangan Pekerjaan 9. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a – huruf j. 2. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 26 ayat (3) Rincian HPS bersifat rahasia tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. • Secara umum, dokumen pengadaan barang/jasa merupakan informasi publik yang bersifat terbuka sebagian mulai dari tahap perencanaan, tahap pemilihan serta tahap pelaksanaan, terkecuali terhadap informasi yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikecualikan. 	<p>A. Data Pegawai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP Pejabat Penandatanganan, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/ Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening) 2. KTP, SIM, Paspor, Dokumen Kepegawaian <p>B. Pihak Ketiga/</p>	Setelah selesai masa pemeliharaan pekerjaan dan/atau sampai dengan 18 tahun

	<p>Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</p> <p>10. Dokumen Penawaran Administratif</p> <p>11. Surat Penawaran Penyedia</p> <p>12. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>13. Berita Acara Pemberian Penjelasan</p> <p>14. Berita Acara Pengumuman Negosiasi</p>	<p>Perpajakan</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana telah di ubah dengan penjelasannya juncto Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beserta penjelasannya.</p>	<p>A. Data Pegawai</p> <p>1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP Pejabat Penandatanganan, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/ Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening)</p> <p>2. KTP, SIM, Paspur, NPWP, Dokumen Kepegawaian</p>	<p>Stakeholder</p> <p>1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili)</p> <p>2. Nilai Kontrak (Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat))</p> <p>3. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)</p>	
	<p>15. Jawaban Sanggah pada Masa Sanggah</p> <p>16. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia</p> <p>17. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia</p> <p>18. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa</p> <p>19. Surat Perjanjian Kemitraan</p> <p>20. Surat Perjanjian Swakelola</p>	<p>9. beserta penjelasannya juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</p> <p>11. Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi</p>	<p>B. Pihak Ketiga/ Stakeholder</p> <p>1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Handphone, Email, Alamat</p>	<p>4. Tandatangan</p> <p>5. NPWP (Undang-Undang g Perpajakan)</p> <p>C. Yang berhubungan dengan Hak</p>	

		<p>Elektronik sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>12. penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</p>	<p>Domisili)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rincian HPS 3. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat) 4. Tandatangan 5. NPWP (Undang-Undang Perpajakan) 6. Gambar Rancangan Pekerjaan <p>C. Yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Inovasi 2. Teknologi 3. Ide Kreatif 4. Hak Paten 5. Hak Cipta 6. Desain Industri 7. Merk 	<p>Kekayaan Intelektual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Inovasi 2. Teknologi 3. Ide Kreatif 4. Hak Paten 5. Hak Cipta 6. Desain Industri 7. Merk <p>D. Dokumen tersebut diatas dapat mengakibatkan terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali peserta tender yang mengirimkan penawaran sebelum waktu 	
--	--	--	---	---	--

			<p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</p>	<p>pembukaan penawaran.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.3. Informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.4. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh peserta tender (selama sistem memfasilitasi)	
--	--	--	--	---	--

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
13	<p>Informasi di dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rahasia pribadi; b. melanggar hak atas kekayaan intelektual; dan/atau c. berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat <p>Kode Arsip: PL1 – Pengadaan (menggunakan kode klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis barang/jasa dan cara pengadaannya)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3, huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. 2. beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. 3. beserta penjelasannya juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 	<ol style="list-style-type: none"> a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. b. Melindungi pelaku pengadaan. c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan.

			<p>Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>e. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 30</p>	<p>Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	
--	--	--	---	---	--

			Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.		
14	<p>Informasi arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia dalam dokumen pemindahan arsip, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Usulan Pemindahan Arsip b. Berita Acara Pemindahan Arsip c. Daftar Arsip yang dipindahkan <p>Kode Arsip: KA3.0 Pemindahan Arsip Inaktif</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengganggu keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 	10 Tahun
15	<p>Dokumen pemusnahan arsip, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berita Acara Penilaian Arsip Usul Musnah b. Persetujuan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengganggu proses pemusnahan arsip b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindung proses pemusnahan arsip b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 	Setelah Berita Acara Pemusnahan

	<p>Pemusnahan Arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia</p> <p>Kode Arsip: KA41 (Pemusnahan Arsip) KA3.1 – Pemusnahan Arsip</p>	<p>Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya</p>	<p>2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	
16	<p>Database Kearsipan</p> <p>Kode Arsip: KA2.0 – Pengelolaan Arsip Aktif</p>	<p>Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 3 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu proses pengelolaan arsip</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan</p>	<p>a. Melindungi proses pengelolaan arsip</p> <p>b. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	10 Tahun

17	<p>Dokumen perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Tugas; b. Surat Perjalanan Dinas; c. Surat Permohonan Izin dari Kementerian Keuangan; d. Surat Persetujuan dari Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara; e. Visa; f. Paspor; dan g. Tiket. <p>Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/ pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya c. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan 	<p>10 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan .</p>
----	--	---	--	--	--

			beserta penjelasannya	(KTP dan Kartu Keluarga)	
18	<p>Dokumen perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. surat tugas; b. surat perjalanan dinas; c. tiket, boarding pass, kwitansi tol; d. kwitansi hotel; dan e. kwitansi pertanggungjawaban lainnya yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut. f. kwitansi mobil dinas g. laporan perjalan dinas <p>Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/ pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya c. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu 	<p>10 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan .</p>

			2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Keluarga)	
19	<p>Dokumen pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>Kode Arsip: KU1.4– Belanja/Pengeluaran Anggaran</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 19 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85</p>	<p>a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>b. Mencegah timbulnya yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>6 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>

		Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
--	--	--	--	--	--

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
Pusat Data Statistik dan Informasi					
20	Data Identitas (termasuk NIK) dan Sarana/Prasarana Pelaku Usaha dan Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Data dapat dibuka hanya untuk instansi pemerintah, dalam hal penyepadanan data NIK berdasarkan kerja sama (MoU) b. Apabila dibuka tanpa ada MoU atau Perjanjian Kerja Sama, maka: <ol style="list-style-type: none"> 1. kan terjadi penyalahgunaan data pribadi pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan 2. dapat mengganggu keamanan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga) 	10 Tahun

			informasi dan kenyamanan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan		
21	Data Sampling Produksi Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 	<ol style="list-style-type: none"> a. Data dapat dibuka, dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka hanya untuk instansi pemerintah, dalam hal penyepadanan data NIK 2. permintaan data agregat produksi Kab/Kota b. apabila dibuka tanpa ada MoU atau Perjanjian Kerja Sama, maka: <ol style="list-style-type: none"> 1. akan terjadi penyalahgunaan data pribadi pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga) 2. data sampling produksi dan nilai produksi perseorangan/badan usaha 	10 Tahun

			dan perikanan 2. dapat mengganggu keamanan informasi dan kenyamanan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan		
--	--	--	--	--	--

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
BLU LPMUKP					
22	Informasi Data Debitur	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf h, e (angka 6). 2. UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26. 3. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Undang Undang PPATK Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 	Untuk menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain.	10 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
23	Data identitas pelaku usaha Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
24	Dokumen Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu persaingan dan usaha yang tidak sehat	10 Tahun
25	Data identitas Pelaku Usaha perizinan SAJI dan Rekomendasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap data pribadi pelaku usaha	10 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
26	Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dalam negeri dan luar negeri beserta Rekomendasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Terdapat data informasi pengiriman dan penerima serta mengungkap pribadi pelaku usaha	10 Tahun
27	Data pelaku usaha perizinan pemanfaatan kawasan konservasi berupa akta pendirian usaha dan lokasi detail usaha	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
28	Dokumen Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
29	Data identitas pelaku usaha perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi pelaku usaha	10 Tahun
30	Dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi pelaku usaha	10 Tahun
31	Data identitas pelaku usaha perizinan berusaha pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, reklamasi, wisata bahari, dan pengangkatan BMKT	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	10 Tahun

No	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
32	Dokumen rekomendasi teknis terhadap perizinan yang mendukung kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	1. Dokumen Masih dalam proses (belum final) 2. Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan dan persaingan usaha.	10 Tahun
33	Dokumen perizinan berusaha pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, reklamasi, wisata bahari, dan pengangkatan BMKT	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	10 Tahun
34	Data identitas pelaku usaha yang mengajukan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	10 Tahun

35	Dokumen perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) beserta dokumen pendukungnya	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha	10 Tahun
36	Data Lokasi BMKT yang belum diverifikasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 1	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat yang belum terverifikasi dikhawatirkan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	10 Tahun
37	Raw Data Hasil Kegiatan Monitoring Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Dapat diberikan Laporan berupa data yang sudah diolah dan analisis	Untuk menghindari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok	10 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
Ditjen Perikanan Tangkap					
38	Data Log book penangkapan ikan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	10 Tahun
39	Data Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (Observer on board)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	10 Tahun

40	Data Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d:	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	10 Tahun
41	Buku Kapal Perikanan	1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 46A. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data rekap jumlah kapal yang memiliki buku kapal perikanan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	10 Tahun
42	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	10 Tahun

			2. Rekap jumlah SIUP		
43	Perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Rekap jumlah SIPI	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	10 Tahun
44	Perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Rekap jumlah SIKPI	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	10 Tahun
45	Datas surat izin penempatan rumpon	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Rekap jumlah SIPR	Nama pemilik, nomor SIPR dan koordinat titik pusat (lintang dan bujur) dari lokasi penempatan rumpon	10 Tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
46	Data Produksi PNBK pasca produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	10 Tahun
Ditjen Perikanan Budi Daya					
47	Data calon penerima bantuan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Data pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, selama belum dilakukan validasi dan penetapan	10 Tahun
48	Data detail penerima bantuan (Nomor Identitas, Nomor Telepon, Alamat Lengkap)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg 	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun

		<p>Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>			
49	Komposisi dan formulasi pakan dan obat ikan terdaftar	<p>1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik.</p>	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun
50	SOP, bahan baku dan tingkat pengawasan dalam sertifikasi CPPIB	<p>1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik.</p>	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun

51	List bahan baku pakan ikan, dan nama importir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik. 	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun
52	Data detail perusahaan importir calon induk, induk dan benih dan inti mutiara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun

Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan					
53	Data detail aktivitas operasional eksportir/importir (jumlah omset, jumlah tenaga kerja, volume ekspor-impor, data pajak, laporan perkembangan usaha)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan 	Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	10 Tahun
54	Data perusahaan Pemohon dan Pemegang Izin Impor melalui sistem nasional Neraca Komoditas Bidang Perikanan dalam kewenangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang" 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat 	10 Tahun

55	Data Pemohon dan Pemegang serta Dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengolahan Ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat 	10 Tahun
56	Data Detail Pemohon dan Pemegang serta Dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat 	10 Tahun
57	Data Detail Perusahaan Pemohon dan Pemegang serta Dokumen Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Menghindari 	10 Tahun

		<p>Pribadi (PDP)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang”</p>	<p>2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan</p>	<p>persaingan usaha tidak sehat</p>	
58	<p>Data detail utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) (Data Pemilik UPI, Jumlah Produksi yang dihasilkan, Jumlah bahan baku yang digunakan, Jumlah omzet, Jumlah Keuntungan).</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</p> <p>2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang”</p>	<p>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan</p> <p>2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan</p>	<p>Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan dalam persaingan usaha yang tidak sehat.</p>	10 Tahun
Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
59	<p>Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Vessel Monitoring System/VMS)</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf d.</p>	<p>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</p> <p>2. Data yang sudah dipublikasikan di website.</p>	<p>1. menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala</p>	10 Tahun

				<p>bentuk kejahatan transnasional;</p> <p>2. menciptakan persaingan usaha tidak sehat; dan</p> <p>3. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.</p>	
--	--	--	--	---	--

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
60	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dari masyarakat (Pokmawas), Awak Kapal Pengawas (AKP), Pengawas Perikanan, atau Pengawas PWP3K.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	1. menghambat penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; dan 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	10 Tahun
61	Strategi gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Perikanan) Pengawas	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	1. menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; dan 2. membahayakan	10 Tahun

				pertahanan dan keamanan negara.	
62	Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	1. menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; dan 2. membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	10 Tahun
63	Motif dan jaringan pelaku tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Sudah dibuka setelah kasus persidangan selesai
64	Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses	10 Tahun

	kelautan dan perikanan	Publik, Pasal 17 huruf a. 2. KUHAP Pasal 72.	penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	
65	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	10 Tahun
66	Identitas Awak Kapal Pengawas (AKP), Pengawas Perikanan, Polisi Khusus PWP3K, PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai peraturan perundang- undangan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.	10 Tahun
67	Data detail spesifikasi Kapal Pengawas Perikanan/senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang	10 Tahun

			pemeriksaan di pengadilan	dapat: membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	
--	--	--	---------------------------	---	--

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
Inspektorat Jenderal					
68	Laporan Hasil Pengawasan Intern, yang meliputi Audit, Pemantauan, Evaluasi, Reviu dan pengawasan lainnya, termasuk Kertas Kerja Pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i dan huruf j. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, Kependudukan, beserta penjelasannya. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1. 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan. 2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data. 	5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi

69	Data dan Informasi Pengaduan Masyarakat dan LHP atas Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1. 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan berupa rekapitulasi pengaduan 2. Pengelola Pengaduan dapat mempublikasikan jumlah, dan status penyelesaian Pengaduan kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan. 2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data. 	5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi
70	Data Pendukung Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP/pemeriksaan BPK-RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh 	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu

		<p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>aparat pengawas internal dan eksternal.</p>		<p>yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi</p>
71	<p>LHP yang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.</p> <p>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</p>	<p>1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.</p> <p>Menjaga hak dan privasi dari pemilik data.</p>	<p>5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi</p>

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
72	Data identitas personal/pribadi peserta didik Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik 	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data 	10 Tahun
73	Data identitas personal/pribadi Alumni/Lulusan dari Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem 	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data 	10 Tahun

		elektronik			
74	Data identitas personal/pribadi Guru,Dosen, dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik 	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data 	10 Tahun
75	Data Identitas personal/pribadi Peserta dan Lulusan Pelatihan Sektor KP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data produksi per Kabupaten, Rekap Pelaku Usaha, Harga ikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Identitas Peserta dan Lulusan Pelatihan (NIK) 	10 Tahun
76	Data Identitas personal/pribadi Penyuluh Sektor KP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Identitas 	10 Tahun

		2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik		Penyuluhan (NIK)	
77	Data Hasil Nilai Uji Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern 2. Data dan Informasi peserta Uji Kompetensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Data Hasil Nilai Diklat Pendidikan dan Pelatihan 	3 Tahun
78	Sertifikat Peserta Uji Kompetensi Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern 2. Sertifikat Peserta Uji Kompetensi Pelaku Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Data Pribadi Peserta Uji Kompetensi Pelatihan 	3 Tahun

79	Sertifikat Peserta Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern 2. Sertifikat peserta pendidikan dan pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Data Pribadi Peserta Pendidikan dan Pelatihan 	3 Tahun
80	Sertifikat Pengesahan Penilaian, dan Pengukuhan Kelas Kelompok Penyuluhan KP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern 2. Data Penilaian Kelas Kelompok Penyuluhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Sertifikat Pengesahan Penilaian, dan Pengukuhan Kelas Kelompok Penyuluhan KP 	3 Tahun

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					
81	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.	<p>1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.</p> <p>2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan</p>	10 Tahun

				<p>hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkann identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.</p>	
82	<p>Modus operandi tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1</p>	<p>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan 2. Dibuka setelah dilakukan publikasi oleh pejabat resmi KKP (secara global: lokasi dan waktu)</p>	<p>Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.</p>	10 Tahun

83	Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	<p>1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1</p> <p>2. KUHAP Pasal 72.</p>	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	10 Tahun
84	Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	10 Tahun
85	Identitas PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya	10 Tahun

86	Data detail aktivitas operasional eksportir/importir	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan	10 Tahun
87	<p>Data yang terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hasil inspeksi; - hasil investigasi; - hasil monitoring uji formalin; - kasus mutu dan hasil perikanan, internal dan temporary suspend; - data umum dan grade HACCP UPI; - nomor Health Certificate; - surat notifikasi/pemberitahuan penolakan ekspor dari negara tujuan; - surat pemberian 	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	10 Tahun

	suspend dan nama UPI yang terkena kasus penolakan ekspor.				
--	--	--	--	--	--

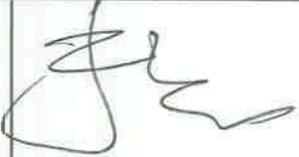
**Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Kelautan
dan Perikanan,**

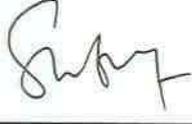


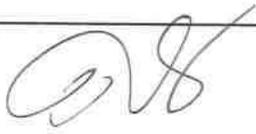
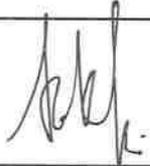
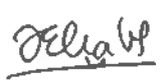
Ari Prabowo

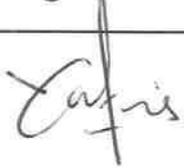
Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Desri Yanti	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	
2	Januarli Marino	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	
3	Emmi Simarmata	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	
4	Diding Sutardi	Analisis Publikasi	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	
5	Yosef Frista Hans Bertiyon	Pranata Humas Ahli Pertama	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	
6	Rae Anggrainy	Arsiparis Ahli Pertama	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	
7	Mila Akmalia Budirini	Pranata Humas Ahli Pertama	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	
8	Awaludin	Pranata Komputer Ahli Pertama	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	
9	Rahadi Susetyo Frenedly Muhamad	Pranata Humas Ahli Pertama	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	

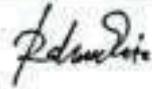
10	Shahandra Hanitiyo	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
11	Fuad Gani	Akademisi	Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia	
12	Cecep Supriyadi	Ketua	Masyarakat Peduli Data Pribadi	
13	Fadel Prayoga	Jurnalis	Kompas TV	
14	Alfreds Tuter	Jurnalis	RRI Programa 3	
15	Okto Rizki Alpino	Jurnalis	Akurat.co	
16	Linda Wahyuningtyas	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Biro Umum dan Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Jenderal	
17	Gayatri Pramudhita	Analisis Data dan Informasi	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
18	Jenny Andea Pertiwi	Pranata Humas Terampil	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
19	Linda Wahyuningtyas, A.Md	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Biro Umum dan Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Jenderal	

20	Riski Ismanto	Analisis Hukum	Biro Hukum	
21	Sarli Assajdah	Analisis Monitoring dan evaluasi	Pusat Pelatihan KP	
22	Bagja Lazwardi	Staff Data	Pusat Pelatihan KP	
23	Kasmawati	Pranata Humas Muda	Sekretariat BPPSDM KP	
24	Irma Yulianti	Staff Hubungan Masyarakat	Sekretariat BPPSDM KP	
25	Falsa Besti Pralampita	Analisis Monitoring dan Evaluasi	Sekretariat BPPSDM KP	
26	Anugerah Rindrasari	Prahum Ahli Muda	Sekretariat BPPMHKP	
27	Dimas Wijanarko	Analisis Perizinan	Pusdatin	
28	Supriyatun	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pusdatin	
29	Muh Nasrum Azis	Auditor Madya	Inspektorat V	
30	Tri Wiharjanti	Auditor Pertama	Inspektorat V	
31	Muhammad Zaenal Muttaqin	Pranata Komputer Ahli Pertama	Biro Hukum	

32	Mahfudl Umar Khamdan	Arsiparis Muda	Biro Umum dan PBJ	
33	Linda Wahyuningtyas	Penelaah Kebijakan PBJ	Biro Umum dan PBJ	
34	Richard Eddy	P Hukum dan Advokasi	BPPSDM KP	
35	Abdul Kodir	Analisis SDM	Biro SDMAO	
36	Achmad Solichin	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/JAsa	Biro Umum dan PBJ	
37	Mutamimul Ula	Arsiparis Ahli Muda	Biro Umum dan PBJ	
38	Amalia Ratri Habibah	Pelaksana	Pusat Pelatihan KP	
39	Risto Naibaho	Fungsional PPBJ Muda	Biro Umum dan PBJ	
40	Hendriyana	Fungsional PPBJ Muda	Biro Umum dan PBJ	
41	Agus Triyanto	Penelaah B/J	Biro Umum dan PBJ	
42	Eka Wahyuningtyas	Penelaah B/J	Biro Umum dan PBJ	
43	Rido Walidaeni	Perencana Muda	Biro Perencanaan	

44	Mindo Romaully	Arsiparis Pertama	Biro Perencanaan	
45	Indah Nur Fitriandini	Humas PDS	Ditjen PDSPKP	
46	Sugiarto	Humas	Direktorat Jenderal PSDKP	
47	Riyanto	Pengelolaan PBJ	Direktorat Jenderal PSDKP	
48	Nur Rakhma Novika	Humas	Direktorat Jenderal PSDKP	
49	Ester Tiurma Ida	Arsiparis Ahli Muda	Biro Umum dan PBJ	
50	Reza Fahlevi R	Analisis Hukum Ahli Pertama	Biro Hukum	
51	Agus Widjanarko	Prakom Muda	BBKIPM Jakarta I	
52	Rina Rahmawati	Pranata Barang/Jas	UKPBJ	
53	Rendy Berniko Irianto	Fungsional PBJ Ahli Pertama	UKPBJ	
54	Yanelis Prasença	Prahum Ahli Muda	Kemenko Marves	
55	Umu Ruqiyah	Staf Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik	Kemenkes RI	

56	Annisa Fitri Wulandari	Prahum Ahli Madya	Kemendag	
57	Wieke Veronica Lamria	Prahum Ahli Pertama	Kemendag	
58	Muhammad Iqbal Pramadi	Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Informasi Publik	Kementerian Keuangan	
59	Fannie Fatta	Pelaksana Subbagian Pengelolaan Layanan Informasi Publik	Kementerian Keuangan	
60	Mukti Herlambang	Pranata Humas Ahli Muda	LKPP	
61	Makkiyah Farizqi	Pranata Humas Ahli Muda	LKPP	
62	Robah Mahzuni	Staff Pelayanan Publik	Kementerian Ketenagakerjaan	
63	Fajar Ramdani S	Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan	Kementerian Ketenagakerjaan	
64	Yulius Arnoldus Sanimin	Analisis Data dan Informasi	Kemendagri	
65	Sazki Dzakiyya Anwar	Pranata Fotografi	Kemendikbudristek	
66	Adintya Tabita Roesi	Pembina Jasa Konstruksi Pertama	Kementerian PUPR	

67	Syifa Rana Adisty	Mahasiswa	Politeknik Negeri Jakarta	
68	Khairunnisa' Mardhiyah	Mahasiswa	Politeknik Negeri Jakarta	
69	Bima Ahmad	Mahasiswa	UIN Jakarta	
70	Aulia Rahmadita	Mahasiswa	Universitas Indonesia	
71	Achmad Fauzan	Mahasiswa	UIN Jakarta	

Demikian Pengujian Konsekuensi Ini dibuat dengan seksama dan penuh ketelitian:

a.n Menyetujui,
 Sekretaris Jenderal selaku Atasan
 Pejabat Pengelola Informasi dan
 Dokumentasi Kementerian Kelautan
 dan Perikanan



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho



MAKLUMAT

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPPP Banyuwangi

Siap memberikan Pelayanan Informasi Publik secara

Cepat, Mudah, Efisien serta Tanpa Diskriminasi

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Banyuwangi, 2 Januari 2024

M. Muchlisin, A.Pi, MP



KOMITMEN BERSAMA
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) BANYUWANGI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kami, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) BANYUWANGI berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di KKP melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan pelayanan informasi publik secara transparan, cepat, mudah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Banyuwangi, 23 April 2024



Kepala BPPP Banyuwangi
Moch. Muchlisin

Kepala Sub Bagian Umum/
Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial



Candra Saputra

Ketua Tim Kerja Pelatihan



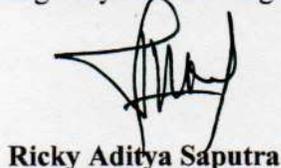
Yanuar Rustrianto Buwono

Koordinator Pelaksana PPID



Firman Pra Setia Nugraha

Bidang Penyelesaian Sengketa



Ricky Aditya Saputra

Ketua Tim Kerja Prasarana dan Sarana
serta Pengelolaan PNB



Imawan Zuhron Abrori

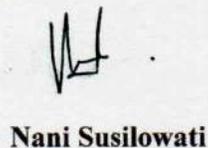
Ketua Tim Kerja Penyuluhan



Dian Tugu Warsito Taufik

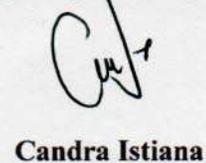
Tim Pelaksana Harian PPID :

Bidang Pelayanan Informasi



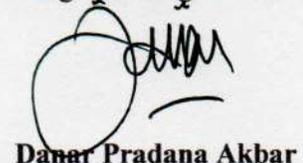
Nani Susilowati

Bidang Pengelolaan Informasi



Candra Istiana

Bidang Teknologi Informasi



Damar Pradana Akbar